



LAPORAN TRIWULAN 1

Januari - Februari - Maret 2021

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif _ 02

Milestone Kuartal I ICCTF 2021 _ 03

I. Rencana Kerja ICCTF Tahun 2021 _ 05

II. Progress dan Capaian _ 07

1. Progress Proyek _ 07

A. COREMAP-CTI World Bank _ 07

B. COREMAP-CTI Asian Development Bank _ 29

C. Blended Finance _ 36

D. Bioekonomi _ 40

E. Blue Carbon _ 41

2. Program Strategis dan Penggalangan Dana (*Fundraising*) _ 42

A. Inisiasi Kerjasama dan Penggalangan Dana _ 42

B. Partisipasi dalam Program Strategis _ 50

3. Communication, *Outreach* dan Kemitraan _ 53

A. Media Sosial _ 54

B. Produksi Media _ 58

C. Media Monitoring _ 61

III. Audit, Keuangan, dan Operasional _ 68

1. Laporan Audit Tahun 2021 _ 68

2. Informasi Keuangan Periode Januari - Maret 2021 _ 68

3. Operasional & Kesekretariatan _ 69

RINGKASAN EKSEKUTIF

Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) merupakan Lembaga Wali Amanat Nasional (*National Trust Fund*) dalam bidang penanganan perubahan iklim. Sebagai Satuan Kerja (Satker) di bawah **Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas**, ICCTF mengelola dana APBN dan dana hibah dari mitra pembangunan dengan tujuan untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam menekan emisi gas rumah kaca serta implementasi adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Kegiatan yang dilaksanakan ICCTF meliputi pengelolaan proyek, penggalangan dana, komunikasi dan *outreach* serta operasional Satker. Dalam hal pengelolaan proyek, ICCTF membagi proyek-proyek yang dikelola berdasarkan *thematic windows* ke dalam empat fokus area, yaitu i) *Land-based Mitigation*; ii) *Adaptation and Resilience*; iii) *Energy*, dan; iv) *Marine-based*. Sejalan dengan peningkatan komitmen Pemerintah Indonesia terhadap pengelolaan laut dan sumber dayanya, saat ini ICCTF menitikberatkan fokus pada tema program berbasis kelautan (*Marine-based*) sejak tahun 2020.

Pada periode triwulan pertama tahun 2021 ini telah dilaksanakan kegiatan ***Kick-off Meeting Coral Reef Rehabilitation and Management Program – Coral Triangle Initiative*** (COREMAP-CTI) Asian Development Bank seiring dengan telah ditetapkannya Mitra Pelaksana untuk enam paket kegiatan. Selain acara *Kick-off Meeting* COREMAP-CTI ADB, pada periode ini juga telah dilaksanakan Seminar Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan: Studi Bioekonomi, seiring dengan selesainya penyusunan laporan akhir hasil kajian bioekonomi perikanan udang di Laut Arafura dan penyusunan rekomendasi kebijakan.

Guna memperkenalkan kegiatan yang dilakukan ICCTF kepada pemangku kepentingan serta khalayak luas, ICCTF secara gencar melakukan kegiatan komunikasi dan *outreach* melalui multimedia. Kegiatan komunikasi meliputi produksi media, pengelolaan sosial media dan website, serta media monitoring. ICCTF juga melakukan penajaman terhadap SOP (*Standard Operating Procedure*) kerja dan sistem komunikasi internal untuk meningkatkan kinerja Satker.

Saat ini ICCTF sedang mengimplementasikan proyek hibah **COREMAP – CTI World Bank (WB)** yang dilaksanakan pada 4 lokasi yaitu **Laut Sawu, SAP Selat Dampier, KKPD Raja Ampat, dan SAP Raja Ampat di 2 propinsi Nusa Tenggara Timur dan Papus**. Kegiatan utama yang dicapai pada periode ini meliputi pembangunan infrastruktur menara pengawas, pusat informasi ekowisata, pusat monitoring Cetacea dan karamba jaring apung. Pengadaan peralatan penunjang survei dan peralatan penunjang pengawasan sebagian sudah diadakan, menunggu pendistribusian. Kegiatan lainnya berupa workshop pengelolaan pesisir, dan peningkatan SDM baik pengelola maupun anggota kelompok termasuk masyarakat adat.

MILESTONE PROGRAM ICCTF

Selain itu ICCTF juga sudah mulai mengimplementasikan 3 dari 6 kegiatan **COREMAP – CTI Asian Development Bank (ADB)** yang dilaksanakan oleh Konsultan Perusahaan. Kegiatan yang sudah dilaksanakan berada di 2 lokasi yaitu dua kegiatan di **KKPD Nusa Penida, Provinsi Bali dan satu kegiatan di TPK Gili Balu, Provinsi Nusa Tenggara Barat**. Proses pengadaan 3 paket pekerjaan sudah mencapai tahap evaluasi yaitu 1 paket di Gili Balu dan 2 paket di Gili matra, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kegiatan Kick-off meeting proyek COREMAP – CTI ADB diselenggarakan di Nusa Dua Bali pada tanggal 30 Maret dan dilanjutkan dengan stakeholder meeting dan pelatihan safeguard dari ADB. Pelaksanaan beasiswa master degree sudah mendapatkan 3 mahasiswa dari 4 yang direncanakan.



Pada periode ini kegiatan **BLENDED FINANCE** melanjutkan komunikasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) membahas inisiatif pendanaan inovatif untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Bersama. Telah tersusun **“Blue Finance Policy Note: Financing options for small-medium fisheries enterprise and marine conservation in Indonesia”**. Seminar Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan: Studi Bioekonomi dilakukan untuk bahan penyusunan rekomendasi kebijakan.

Kegiatan **BLUE CARBON** pada periode ini berupa diskusi dengan DISER Australia dalam rangka persiapan kegiatan **Policy Dialog dan Policy Training** yang melibatkan Pemerintah Pusat dan Daerah, serta persiapan COP 26. Selain itu koordinasi dilakukan dengan AFD menyangkut **Eco Fishing Port** dan perbaikan **Concept Note**.

Penggalangan dana mulai dilakukan penjajakan dengan Asian Development Bank dalam program **Sustainable Fisheries** pada komoditas udang yang dibudidayakan. Selain itu pembahasan tentang potensi dukungan pendanaan dari World Bank masih terus dilanjutkan.

Hasil kegiatan **dipublikasi dalam website ICCTF** dan **melalui media sosial ICCTF**. Selain itu kerjasama media sosial dilakukan bersama mitra. Persiapan pembuatan dokumentasi kegiatan di Raja Ampat dibahas bersama National Geographic, bidang komunikasi World Bank dan juga dengan pakar komunikasi lainnya. Perbaikan website ICCTF mulai dilakukan pada masa ini. Selain itu tim komunikasi juga mulai **melakukan analisis media sosial** guna melihat perkembangan sosialisasi program kepada masyarakat umum.

RENCANA KERJA

ICCTF 2021

Q2
April
Mei
Juni

COREMAP-CTI WORLD BANK

- Implementasi program
- *Monev* program
- *Spot-check* Keuangan
- *Workshop* Pelaporan

BLUE CARBON

- FGD untuk penyusunan proposal kerjasama dengan ADB (sustainable fisheries)
- Pembahasan kerjasama dengan Australia
- Pembahasan TOR dengan AFD

COMMUNICATION & OUTREACH

- Pembahasan materi komunikasi podcast dan factsheet
- Penyusunan ICCTF News
- Laporan kuartal
- Menyusun prosiding.

COREMAP-CTI

ASIAN DEVELOPMENT BANK

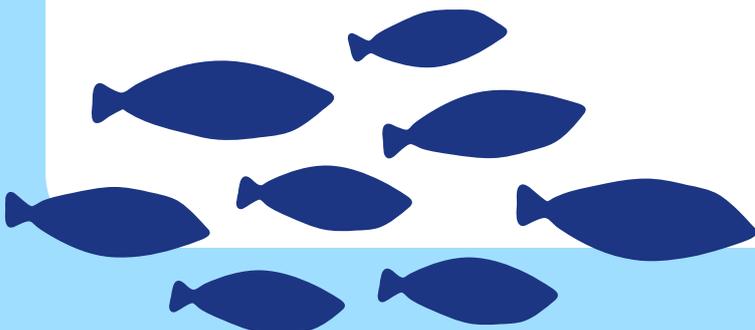
- Kontrak 3 Mitra Proyek
- *Entry Meeting* di Nusa Tenggara Barat
- *Inception Report*
- *Monev* Program
- *Spot-check* Keuangan
- *Workshop* Pelaporan

BLENDED FINANCE

- Pendampingan *Blue Finance*
- Penyelesaian buku putih
- Pembahasan SPK dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Penjajakan *Blue Finance* dengan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup

FUNRAISING

- Penggalangan dana internasional
- Mengikuti FGD BKF
- Penggalangan dana eksternal



Rencana kerja ICCTF di tahun 2021,

meliputi implementasi proyek hibah COREMAP-CTI World Bank dan COREMAP-CTI Asian Development Bank, Penelitian Bioekonomi, Penggalangan dana dan Komunikasi, serta Operasional Satker. **Pada periode kuartal pertama : Januari-Maret 2021**, beberapa kegiatan penting yang telah dilaksanakan di antaranya adalah *Kick-Off* COREMAP-CTI ADB dan Workshop Hasil Kajian Studi Bioekonomi Perikanan Udang di Laut Arafura. Pada kuartal I ini, program beasiswa *master degree* COREMAP-CTI ADB juga dimulai. Untuk kekurangan seorang peserta beasiswa masih akan dilakukan interview. Ada pun untuk COREMAP-CTI WB, pada kuartal ini dilakukan rangkaian monev dan *spotcheck* terhadap masing-masing Paket Kegiatan. Di luar itu, pada kegiatan penggalangan dana, ICCTF melanjutkan koordinasi dalam rangka persiapan proyek LAUTRA, *Eco Fishing Port* dan *sustainable aquaculture*. Pada kuartal ini juga dilakukan inovasi baru pada produksi materi komunikasi dalam bentuk podcast.

Pada kuartal kedua : April-Juni 2021, ICCTF akan memulai kegiatan monitoring lapangan COREMAP-CTI WB dan proponent masih akan terus melanjutkan implementasi Paket Kegiatan berupa pembangunan infrastruktur, penyusunan media dan alat bantu pembelajaran serta pelaksanaan workshop. Untuk COREMAP-CTI ADB, pada kuartal ini masih dilanjutkan proses pengadaan dan kontrak untuk konsultan individu dan perusahaan. Sementara pada operasional saat ini akan dimulai audit oleh BPK.

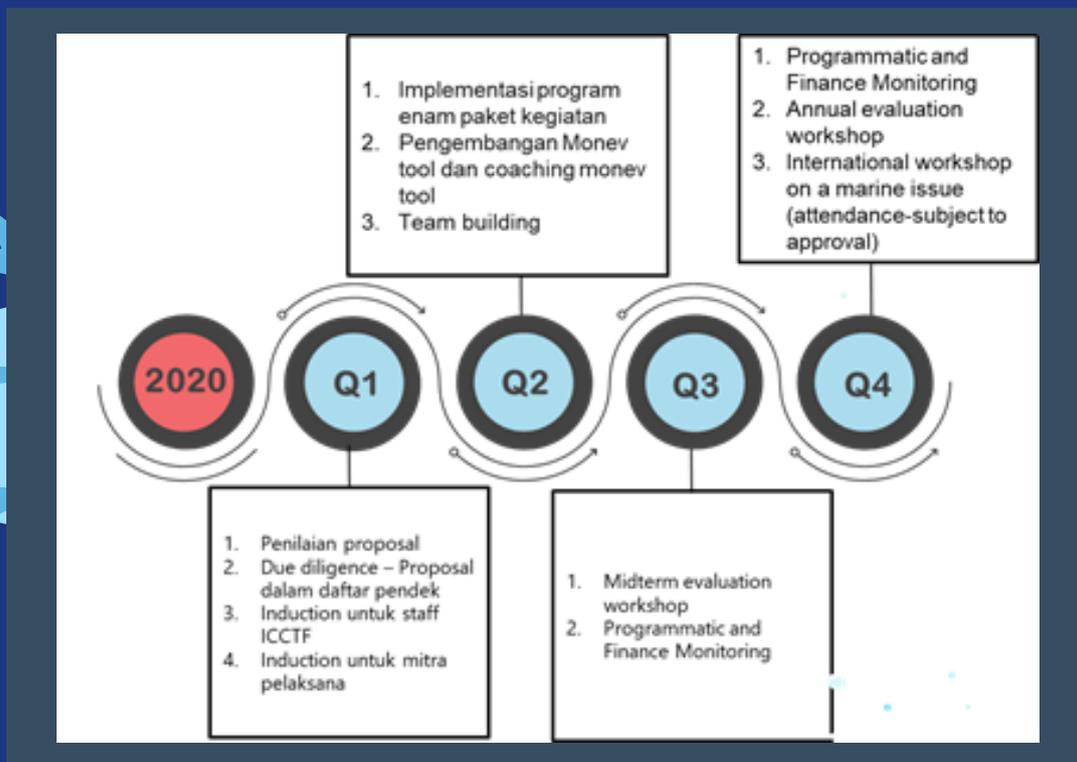
Selanjutnya untuk **kuartal ketiga : Juli-September dan keempat : Oktober-Desember**, secara garis besar ICCTF merencanakan sudah memulai implementasi proyek yang sebelumnya dalam tahap persiapan yaitu Paket Kegiatan COREMAP-CTI ADB dan studi bioekonomi tuna, kakap merah dan rumput laut di Lesser Sunda. Pada periode ini juga akan dilakukan kegiatan kunjungan untuk pemantauan implementasi di lapangan baik dari sisi program maupun keuangan, serta Workshop Evaluasi Proyek Hibah. Hal ini bertujuan untuk memastikan implementasi kegiatan proyek berjalan secara efektif dan sesuai SOP, demi akuntabilitas proyek. Selain itu, pada kuartal keempat, ICCTF akan berpartisipasi pada forum internasional UNFCCC - COP 26 di Glasgow, Skotlandia.

PROGRESS & CAPAIAN

1. PROGRES PROYEK

A. COREMAP-CTI World Bank

Rencana kerja utama COREMAP-CTI World Bank pada Triwulan 1 (TW1) tahun 2021 adalah melanjutkan implementasi program enam paket kegiatan yang sudah mulai dilakukan oleh Mitra Pelaksana pada Triwulan 3 (TW3) tahun 2021. Periode Oktober-Desember 2020, kegiatan COREMAP-CTI WB fokus kepada implementasi enam paket kegiatan, setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama dengan Mitra Pelaksana pada 29 Juli 2020. Terdapat beberapa penyesuaian kegiatan di kuartal ini sebagai respon dari progress dan capaian di kuartal 3. Hal ini menyebabkan belum bisa tercapainya beberapa indikator capaian dari kegiatan COREMAP-CTI World Bank (Tabel 3.1), karena implementasi program berjalan lebih lambat, salah satunya akibat adanya Pandemi Covid-19.



Gambar 1.a.1 Rencana Kerja COREMAP-CTI World Bank yang dilakukan oleh ICCTF.

Tabel 1.a.1
Indikator capaian kegiatan COREMAP-CTI
Komponen 3 sampai pada akhir proyek.

Indikator	Unit	Base line	Target 2020	End of Year Target	Sumber verifikasi / Sumber data / Methodologi	Paket Kegiatan yang berkaitan dengan indikator
Indikator capaian level Project Document Objective (PDO)						
Pengelolaan ekosistem prioritas mencapai 75% level biru	Jumlah Kawasan Konservasi Perairan	0	1	4	Review laporan survey monitoring dan pengecekan sesuai kriteria yang ditentukan	Paket 1 – 6
Indikator capaian antara (Intermediate Result Indicator)						
Komponen 3: Pengelolaan ekosistem pesisir prioritas						

Indikator 3.1						
Aset infrastruktur ekowisata kecil dibangun di wilayah KKP target, sesuai dengan rencana pengelolaan KKP	Jumlah Infrastruktur	0	4	8	Laporan khusus kegiatan	Paket 1 dan Paket 2

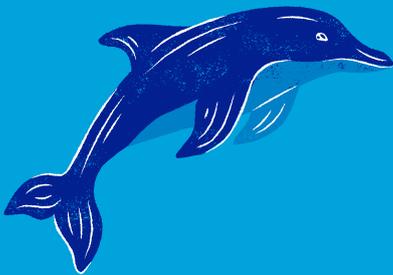
Indikator 3.2						
Penguatan POKMASWA S yang melakukan pengawasan rutin di daerah-daerah sasaran MCA	Jumlah kelompok	0	12	18	Laporan khusus kegiatan	Paket 5 dan Paket 6

Indikator 3.3						
Kegiatan rencana aksi RZWP3K provinsi dilaksanakan di wilayah target KKP	Jumlah Kegiatan	0	8	14	Laporan khusus kegiatan	Paket 4

Indikator 3.5						
Jumlah kegiatan manajemen Rencana Aksi Nasional untuk Hiu, Cetacea, dan Pari Manta yang dilaksanakan di target KKP	Jumlah Kegiatan	0	6	9	Laporan khusus kegiatan	Paket 3

Berikut ini adalah progress dari masing-masing rencana kegiatan pada Triwulan 1 tahun 2021 (Januari – Maret 2021):

A. Rapat Persiapan Audit BPK dan Rekonsiliasi Capaian Program, Keuangan dan Pengadaan Mitra COREMAP-CTI World Bank.



Gambar 1.a.2 Rapat Persiapan Audit BPK dan Rekonsiliasi Capaian Program, Keuangan, dan Pengadaan Mitra Pelaksana COREMAP-CTI World Bank.

Pada tanggal 14 – 15 Januari 2021, ICCTF mengadakan kegiatan rapat persiapan audit BPK dan rekonsiliasai capaian program, keuangan dan pengadaan untuk mitra pelaksana COREMAP-CTI World Bank. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap program-program yang sudah berjalan di tahun 2020 serta melengkapi dokumen-dokumen laporan program, keuangan serta pengadaan dalam rangka persiapan audit BPK.

Kegiatan ini dilakukan di Hotel Fairmont, Jakarta dan dihadiri oleh 6 mitra pelaksana COREMAP-CTI World Bank. Kegiatan dibuka oleh Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas dan dilanjutkan dengan *Overview* Capaian COREMAP-CTI World Bank TA 2020 oleh Perencana Madya Direktorat Kelautan Perikanan Bappenas. Pemaparan terkait Langkah-langkah audit BPK disampaikan oleh Liaison Officer ICCTF, IBAU Bappenas dan PPK MWA ICCTF. Dalam sesi diskusi beberapa *point* penting yang harus dipersiapkan terkait dengan strategi untuk menghadapi audit BPK antara lain penyusunan laporan keuangan harus sesuai dengan pedoman, memberikan info dan keterangan untuk dokumen audit, melakukan reviu terhadap semua dokumen pertanggungjawaban, serta pihak pelaksana harus bisa menjelaskan dengan baik terkait realisasi capaian dengan pengeluaran.

B. Monitoring Capaian COREMAP-CTI World Bank dan Rencana Kerja TA 2021.

Pada bulan Januari-Februari 2021, ICCTF melakukan serangkaian diskusi *one-on-one* terhadap mitra pelaksana untuk membahas capaian COREMAP-CTI World Bank TA 2020 dan Rencana Kerja TA 2021. Diskusi dilakukan bersama 6 Mitra Pelaksana dengan jadwal sebagaimana terlampir berikut.

- 19-20 Januari 2021 bersama PILI;
- 22-23 Januari 2021 bersama PKSPL IPB;
- 27-28 Januari 2021 bersama TERANGI;
- 2-3 Februari 2021 bersama YAPEKA;
- 5-6 Februari 2021 bersama Yayasan Reefcheck Indonesia.



Kegiatan diawali dengan presentasi capaian oleh masing-masing mitra hingga akhir tahun 2020. Selanjutnya, dilakukan diskusi dan tanya jawab dengan Direktorat Kelautan dan Perikanan, Bappenas serta ICCTF, serta penjelasan hasil reviu hingga periode Desember 2020. Beberapa catatan penting dari hasil diskusi tersebut antara lain, sebagai berikut :

PILI (Paket 6)

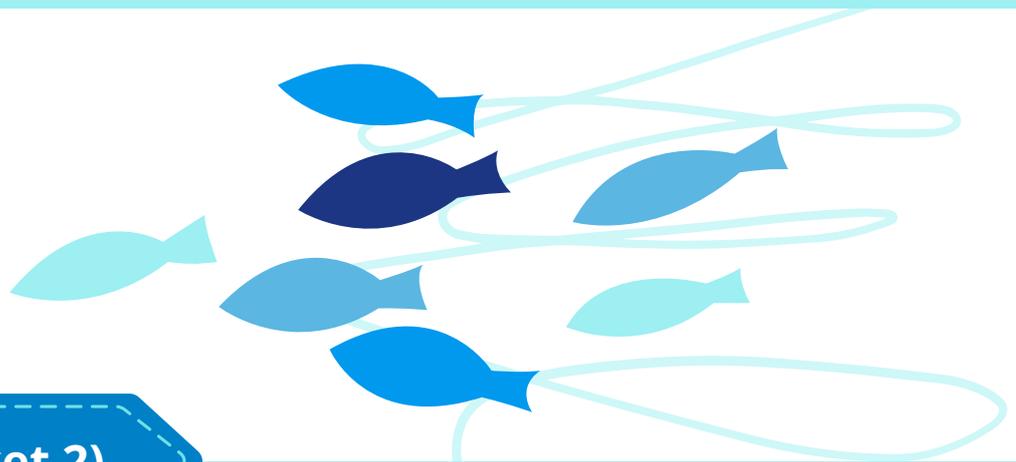
1. Proses pendampingan KMHA harus melibatkan pemerintah Provinsi baik yang di Rote, NTT maupun di Raja Ampat, Papua Barat.
2. Pendampingan KMHA harus berdampak terhadap pengelolaan sumberdaya alam, dan dampak tersebut harus dapat terukur.
3. Melengkapi Kebutuhan dokumen untuk pengadaan jasa: Surat lamaran, CV kandidat / pembanding. Dimulai dengan penyusunan TOR, proses undangan dan surat lamaran, penyampaian penawaran.

PKSPL IPB (Paket 4)

1. Matriks *budget vs output* tahun 2020 perlu dibuat dengan nilai presentasi budget serta output yang mendekati, yang menandakan bahwa penyerapan anggaran kurang lebih sesuai dengan output yang telah dihasilkan.
2. Melengkapi Kebutuhan dokumen untuk pengadaan jasa: Surat lamaran, CV kandidat/pembanding. Dimulai dengan penyusunan TOR, proses undangan dan surat lamaran, penyampaian penawaran.

PILI (Paket 1 & 5)

1. Kementerian Kelautan Perikanan telah menyetujui pemindahan lokasi pembangunan infrastruktur dari SAP Waigeo Sebelah Barat ke KKPD Misol. KKPD Misol merupakan Kawasan konservasi yang ditetapkan oleh KKP walaupun pengelolaannya tidak secara langsung dilakukan oleh KKP.
2. Perlu berkoordinasi dengan pengelola KKPD Misol terkait dengan pemindahan lokasi tersebut dan selalu melibatkan pengelola dalam setiap pertemuan dengan masyarakat untuk menghindari terjadinya konflik.
3. Proses legalisasi POKMASWAS untuk mendapatkan SK dari Provinsi ditargetkan harus selesai di Bulan Juni 2021, sehingga pada semester 2 tahun 2021 bisa berfokus kepada penguatan POKMASWAS dan mulai melakukan aktivitas pengawasan di wilayah masing-masing.



YAPEKA (Paket 2)

1. Pelaksanaan konstruksi wajib mengikuti Rencana K3L, antara lain penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) oleh kontraktor,
2. YAPEKA akan menyampaikan revisi lampiran SPK, termasuk RAB dan peta lokasi sesuai diskusi, untuk dijadikan Adendum Lampiran SPK,
3. Laporan bulanan perlu dilengkapi dengan progress kurva S untuk masing-masing infrastruktur yang sudah mulai dibangun, termasuk data Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan (K3L).
4. *Gender Action Plan* (GAP) yang telah dibuat oleh YAPEKA untuk keseluruhan proyek perlu dilaporkan dalam laporan kuartal dan tahunan.
5. Perlunya peningkatan koordinasi antar mitra pelaksana, khususnya yang memiliki lokasi implementasi yang sama.

REEFCHECK (Paket 3)

1. Perlu dilakukannya workshop untuk penyerahan masing-masing dokumen hasil kajian sehingga *stakeholder* paham akan pentingnya semua studi yang telah dilakukan sebelumnya.
2. Untuk pelaksanaan program kegiatan pariwisata, perlu berkoordinasi dengan Yapeka di TNP Laut Sawu (terkait menara pantau dan pendampingan Pokdarwis di Semau), Terangi di Raja Ampat (fasilitas wisata di Manta Ridge-Yefnabi, Meosmanggara), dan proponent lainnya agar berkesinambungan.
3. Koordinasi perlu dipastikan agar dilakukan dengan semua *stakeholder* terkait, terutama di level daerah (provinsi maupun kabupaten) seperti Bappeda, DKP dan Dinas Pariwisata di Raja Ampat dan TNP Laut Sawu.
4. Berhubungan dengan kegiatan audit, selain laporan keuangan perlu juga disiapkan MoV (*Means of Verification*) terkait pelaksanaan program.
5. Bila pelaksanaan riset ingin berkolaborasi dengan Bionesia untuk pelaksanaan *study genetic*, YRCI perlu mempersiapkan MoU antar lembaga sesuai dengan batasan pelaksanaan program dan mempertimbangkan pendanaan.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, PILI, PKSPL IPB dan TERANGI wajib menyelesaikan kelengkapan dokumen program, perlindungan lingkungan dan sosial, pengadaan, dan administrasi keuangan, sesuai dengan pembahasan dari hasil diskusi tersebut serta harus memperhatikan point-point penting diatas dalam melaksanakan program di tahun 2021. Kegiatan ini akan dilakukan juga untuk mitra lainnya pada bulan berikutnya.



Gambar 1.a.2 Diskusi dan review dokumen output program paket 4



Gambar 1.a.3 Diskusi dan review dokumen output program paket 6

C. Workshop Persiapan Audit BPK

Pada Tanggal 2 Maret 2021 bertempat di Hotel Fairmont Jakarta, ICCTF bersama dengan 6 Mitra Pelaksana COREMAP-CTI World Bank mengadakan kegiatan Workshop Persiapan Audit BPK. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari kegiatan serupa yang diadakan pada bulan Januari 2021. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap program-program yang sudah berjalan di tahun 2020 serta melengkapi dokumen-dokumen laporan program, keuangan serta pengadaan dalam rangka persiapan audit BPK.



Gambar 1.a.4 Workshop Persiapan Audit BPK di Hotel Fairmont Jakarta

Dalam sambutannya Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas, Dr. Sri Yanti menyampaikan bahwa audit oleh BPK ini merupakan yang pertama kalinya bagi ICCTF, oleh karena itu untuk meminimalkan temuan oleh BPK penting bagi ICCTF serta Mitra Pelaksana untuk mempersiapkan dokumen-dokumen permintaan auditor, melakukan review ulang terhadap semua dokumen yang diperlukan dan menyamakan persepsi terkait aturan – aturan pengelolaan *project*. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut, semua mitra pelaksana diwajibkan untuk menyerahkan dokumen-dokumen permintaan BPK sebelum jadwal pemeriksaan dimulai pada pertengahan bulan Mei 2021, selain itu masing-masing Mitra Pelaksana menunjuk 1 orang PIC sebagai *Auditor Focal Point* yang akan bertugas untuk membangun komunikasi intens dengan ICCTF dan BPK selama persiapan dan proses audit berlangsung.

C. Subgrant Implementation.

Paket Kegiatan 1.

a. Pembangunan Infrastruktur Ekowisata Skala Kecil.

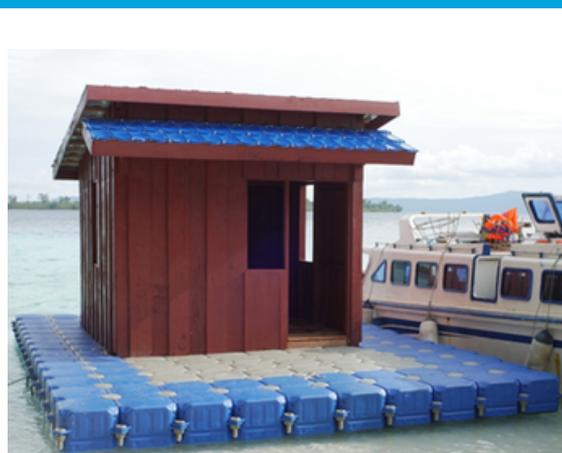
Hingga periode Kuartal 1 2021, kegiatan utama Yayasan Terangi selaku mitra pelaksana COREMAP-CTI World Bank Paket 1 adalah pembangunan Infrastruktur ekowisata skala kecil dan infrastruktur penunjang pengembangan sektor perikanan. Total ada 5 infrastruktur yang sedang dalam proses pembangunan pada periode ini, 3 infrastruktur sebagai penunjang pengembangan ekowisata dan 2 infrastruktur untuk pengembangan sektor perikanan. Progress pembangunan infrastruktur pada sebagai berikut:

1. Stasiun Pemantauan Pari Manta di Yefnabi Kecil (SAP Raja Ampat) progres pembangunan mencapai 85%.
2. Stasiun Pemantauan Pari Manta di Pulau Batanta (KKPD Selat Dampier) progres pembangunan mencapai 72%.
3. Pusat Informasi Ekowisata di Miosara Kecil (SAP Raja Ampat) progres pembangunan mencapai 93%.
4. KJA di Arefi Selatan (SKKPD Selat Dampier) progres pembangunan mencapai 78%.
5. KJA di Yensawai Timur (KKPD Selat Dampier) progres pembangunan mencapai 78%.

Pemenuhan material kayu oleh pihak kontraktor pelaksana pembangunan mengalami kendala, material kayu harus didatangkan dari Sorong karena kayu-kayu yang ada di Waisai asal-usul produk kayunya masih kurang jelas. Hal tersebut berdampak kepada proses pembangunan infrastruktur yang mengalami keterlambatan terutama pada pembangunan Stasiun Pemantauan Pari Manta.



Gambar 1.a.5 Pusat Informasi Ekowisata di Miosara Kecil (SAP Raja Ampat)



Gambar 1.a.6 Stasiun Pemantauan Pari Manta

Paket Kegiatan 2.

b. Pembangunan Pusat Informasi Ekowisata dan PLTS.



Kegiatan utama yang dilakukan oleh YAPEKA pada periode bulan Januari adalah melanjutkan pembangunan 2 infrastruktur skala kecil, yaitu Pusat Informasi Ekowisata (PIE) di Sabu dan PLTS di Nusa Manuk, Rote Ndao. SPK dengan kontraktor pelaksana pembangunan PIE di Sabu sudah ditandatangani pada 30 November 2021, namun proses pembangunannya terkendala cuaca yang kurang baik. Pengiriman bahan bangunan dari Kupang ke Sabu mengalami penundaan karena cuaca buruk yang tidak memungkinkan kapal dapat berlayar dari Kupang ke Sabu, sehingga proses pembangunan baru benar-benar efektif pada periode Januari ini.

Sampai akhir Januari 2021 progres pembangunan baru mencapai 14,43 %. Progres pembangunan PLTS di Nusa Manuk, Kab. Rote Ndao pada bulan Januari 2021 baru pada tahapan pengiriman bahan dan alat serta persiapan tenaga kerja di lapangan. Pemasangan instalasi PLTS mengalami keterlambatan dikarenakan teknisi dan beberapa peralatan kerja belum dapat menuju lokasi akibat cuaca buruk yang mengakibatkan kapal rute Kupang-Rote tidak bisa berangkat. Rencananya instalasi PLTS akan dilaksanakan pada bulan Februari 2021 saat cuaca lebih kondusif.

C. Instalasi PLTS di Nusa Manuk, Rote Ndao.

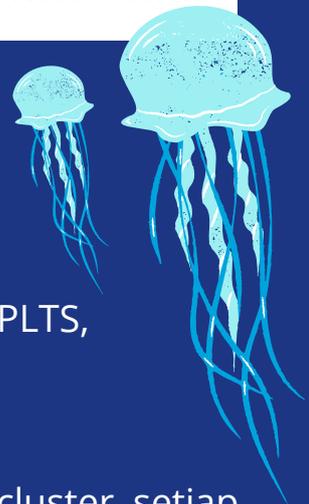
Pada periode bulan Februari 2021 pembangunan PLTS di Nusa Manuk, Kabupaten Rote Ndao sudah memasuki tahap akhir dari rangkaian proses pembangunan. Pada tanggal 8 Februari 2021 Yapeka telah melakukan instalasi PLTS bersama dengan tim kontraktor pelaksana dan dibantu oleh masyarakat Nusa Manuk. Pengerjaan instalasi PLTS ini memakan waktu 10 hari, pengerjaan meliputi:



Gambar 1.a.8 Instalasi Panel Surya di Nusa Manuk

- Survey lokasi penempatan modul dan generator,
- Pemasangan instalasi listrik di setiap rumah warga,
- Pembuatan kerangka Panel Surya,
- Pemasangan instalasi sistem PLTS,
- Penyambungan instalasi listrik di setiap rumah dengan sistem PLTS,
- Monitoring sistem PLTS yang sudah terpasang, dan
- Sosialisasi pengoperasian dan perawatan sistem PLTS.

Instalasi sistem PLTS yang dipasang terbagi menjadi 8 kelompok/cluster, setiap kelompok terdiri dari 3-4 rumah yang akan dialiri oleh satu unit pembangkit dan 2 unit panel surya. Instalasi PLTS di setiap kelompok rumah dialiri oleh pembangkit berkapasitas 2 kW dengan panel surya berkapasitas 700 Wp yang dapat bertahan selama 2 hari (dalam keadaan mendung) dan dapat digunakan untuk menyalakan 2-4 buah lampu, mengisi baterai telepon genggam, dan mengisi baterai senter. Selain itu juga terdapat 1 sistem PLTS berkapasitas 3,2 kW dengan panel surya berkapasitas 2,1 kWp untuk mengaliri listrik rumah usaha produksi perikanan dan rumput laut. Rumah usaha ini merupakan fasilitas bersama bagi seluruh warga nelayan di Nusa Manuk yang akan dilengkapi dengan peralatan produksi untuk pengemasan ikan, rumput laut, pusat pengisian baterai untuk lampu LED dan senter nelayan di Nusa Manuk. Rumah produksi ini diharapkan dapat menjadi pusat untuk mendorong usaha-usaha produktif yang dilakukan oleh masyarakat Nusa Manuk.



d. Persiapan Pelatihan Pencegahan *Bycatch*.

Dalam rangka persiapan kegiatan pelatihan pencegahan bycatch, pada tanggal 24 – 27 Maret 2021 Yapeka melakukan rangkaian persiapan kegiatan yang meliputi:

1. Koordinasi dan diskusi rencana teknis kegiatan pelatihan pencegahan bycatch dengan BKKPN, Perguruan Tinggi di Kupang (UNDANA) dan Dewan Konservasi Perairan Provinsi (DKPP) NTT;
2. Koordinasi dengan Kelompok Nelayan untuk identifikasi calon peserta yang akan dihadirkan sebagai peserta pelatihan;
3. Survei lokasi untuk praktik pelatihan pencegahan bycatch di Kampung Nelayan.



Gambar 1.a.9 Suasana Koordinasi dengan Kelompok Nelayan di Tablolong perihal rencana kegiatan pelatihan pencegahan *bycatch*

Sasaran dari pelatihan ini adalah kelompok nelayan di Desa Tablolong, Kabupaten Kupang, potensi risiko kejadian bycatch di daerah ini dilaporkan cukup banyak terjadi terutama untuk penyu dan lumba lumba. Dari hasil identifikasi diketahui bahwa karakteristik perikanan di Desa Tablolong sesuai dengan pelatihan yang akan dilakukan, dimana nelayan di desa Tablolong menggunakan kapal dengan ukuran 5 – 10 GT dengan ABK berjumlah kurang lebih 12 orang dan menggunakan alat tangkap jaring pukat manual. Hal ini sesuai dengan rencana pelatihan pencegahan bycatch yang sasarannya adalah untuk perikanan laut nelayan skala kecil kurang dari 10 GT.

Universitas Nusa Cendana (UNDANA) akan mengikutsertakan beberapa mahasiswa tingkat akhir Fakultas Kelautan dan Perikanan pada pelatihan tersebut sekaligus akan melakukan monitoring pencegahan bycatch pasca pelatihan, UNDANA juga berminat untuk menindakjuti pelatihan dengan melakukan riset lanjutan dan membuat analisis data untuk keperluan riset dan jurnal ilmiah bagi staff dosen sebagai bentuk keberlanjutan proyek COREMAP-CTI World Bank. Sedangkan Universitas Kristen Artha Wacana akan melibatkan mahasiswa setelah pelatihan bycatch untuk melakukan *follow-up* pengembangan produk.

Paket Kegiatan 3.

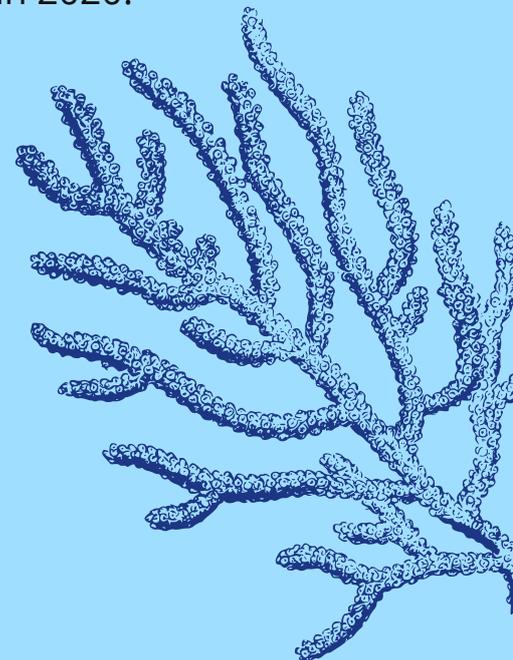
e. Asistensi *Programmatic Monitoring* dan Evaluasi *Procurement* dan Keuangan.



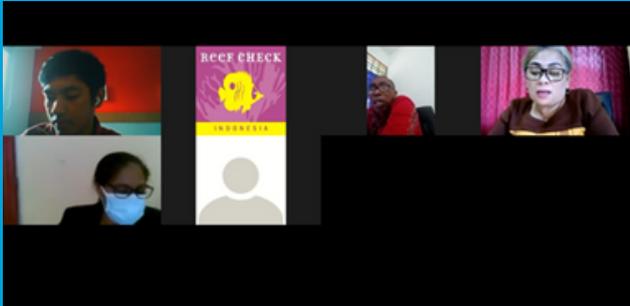
Gambar 1.a.10 Review dan penyusunan dokumen pengadaan

Pada tanggal 25–26 Januari Yayasan Reefcheck Indonesia mengadakan kegiatan asistensi programmatic monitoring dan evaluasi procurement dan keuangan. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan reviu terhadap keseluruhan proses pengadaan yang berkaitan dengan pelaksanaan program yang telah dilakukan oleh Reefcheck serta dalam rangka persiapan audit BPK untuk mitra pelaksana COREMAP–CTI World Bank tahun anggaran 2020.

Kegiatan dilakukan secara one-on-one antara Reefcheck Indonesia dengan tim procurement ICCTF dengan langsung melakukan pengecekan terhadap dokumen-dokumen pengadaan serta dokumen pelengkapannya. Dari hasil kegiatan ini ada beberapa catatan yang perlu mendapat perhatian antara lain Reefcheck harus melengkapi dokumen pengadaan barang dan jasa terutama pada pemenuhan kinerja dan deliverable, baik dari konsultan proyek maupun vendor pengadaan barang dan jasa.



f. Rangkaian Pertemuan Untuk Koordinasi dan Persiapan Kajian Potensi Pengembangan Wisata Spesies Berbasis Masyarakat Yang Berkelanjutan.



Gambar 1.a.11 Diskusi melalui zoom meeting dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pada tanggal 17–28 Februari 2021 Yayasan Reefcheck Indonesia mengadakan rangkaian pertemuan dengan para pemangku kepentingan dan tenaga ahli terkait dari tingkat nasional dan provinsi dalam rangka koordinasi dan persiapan kajian pengembangan wisata spesies berbasis masyarakat yang berkelanjutan.

Pertemuan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari kegiatan workshop pengelolaan hiu, pari manta dan cetacean yang diselenggarakan pada 30 November–2 Desember 2020 lalu. Kegiatan dilakukan dengan menggabungkan pertemuan online via media zoom (mayoritas pertemuan) dengan pertemuan langsung terbatas serta komunikasi melalui email, total 35 peserta dari 19 organisasi terlibat dalam pertemuan ini.

Fokus dari kegiatan ini adalah untuk membangun koordinasi dengan para pihak, mendapatkan data dan informasi terkait lokasi potensial untuk melaksanakan kajian, membangun kesepahaman tentang apa yang akan dihasilkan oleh rencana kajian tersebut serta langkah lanjutannya dengan pihak terkait dan pemangku kepentingan strategis. Hasil dari pertemuan tersebut antara lain adalah teridentifikasi lokasi-lokasi prioritas untuk kajian wisata spesies baik di TNP Laut Sawu maupun di Raja Ampat, lokasi-lokasi prioritas yang teridentifikasi antara lain yaitu TNP Laut Sawu & Kab Raja Ampat.

Koordinasi lebih lanjut dalam rangka implementasi kajian akan dilakukan dengan BLUD Raja Ampat, DKP Kabupaten Raja Ampat, staf lapangan BKKPN Kupang Satker Raja Ampat, Disparekraf NTT dan DKP propinsi NTT. Kunjungan lapangan akan dibantu secara langsung oleh para staf lapangan mitra pelaksana COREMAP–CTI World Bank (Yapeka, PILI, dan Terangi).

TNP Laut Sawu

- a. Pulau Semau, Kabupaten Kupang
- b. Lifuleo, Kabupaten Kupang
- c. Soelamoe, Kabupaten Kupang
- d. Teluk Bariti, Kabupaten Kupang
- e. Pesisir Barat Nembrala dan sekitarnya, Pesisir Selatan (Nusa Manuk), Pesisir Timur (mulut 1000/Timori), Rote Nadao.

Kab. Raja Ampat

- a. Kampung Yensawai, Batanta, KKPD Selat Dampier
- b. Manta sandy, manta ridge, KKPD Selat Dampier
- c. Kampung Meosmanggara, Yefnabi Kecil (SAP Raja Ampat)

g. Pelaksanaan Kajian Pengembangan Wisata Spesies Berbasis Masyarakat yang Berkelanjutan.

Salah satu program dari paket kegiatan 3 (tiga) COREMAP-CTI World Bank yang diimplementasikan oleh Yayasan Reefcheck Indonesia adalah Pengembangan Wisata Spesies Berbasis Masyarakat yang Berkelanjutan di TNP Laut Sawu dan SAP Raja Ampat.



Gambar 1.a.12 Dokumentasi kajian di Desa Sotimori, TNP Laut Sawu

Pada tanggal 13 Maret – 10 April 2021 Reefcheck melakukan kajian yang bertujuan untuk mengidentifikasi lokasi implementasi program; menetapkan jenis infrastruktur pendukungnya; mengidentifikasi aspek pengembangan kapasitas; serta membangun rencana pengembangan pemasaran dan pembangunan bisnis selama masa implementasi proyek.

Kajian dilakukan dengan menggabungkan metoda diskusi mendalam, pengamatan lapangan langsung, dan survey cepat pasar. Secara total, dalam penyusunan laporan kajian ini tim YRCI telah melakukan 16 pertemuan/koordinasi serta 5 kali kunjungan lapangan yang melibatkan setidaknya 34 individu dan 13 institusi.

Dalam melakukan survey cepat, tim YRCI mengumpulkan data dan informasi dari 38 kelompok serta agen/pemandu-industri wisata yang dianggap mewakili setidaknya 864 suara. YRCI juga mewawancarai secara informal lebih dari 50 penduduk kota Kupang dan lima pengemudi/pemandu.

Dari kajian ini telah terpilih dua lokasi di TNP Laut Sawu, dan satu lokasi di KKPD/SAP Raja Ampat untuk implementasi pengembangan wisata paket 3 ICCTF. Lokasi tersebut adalah:

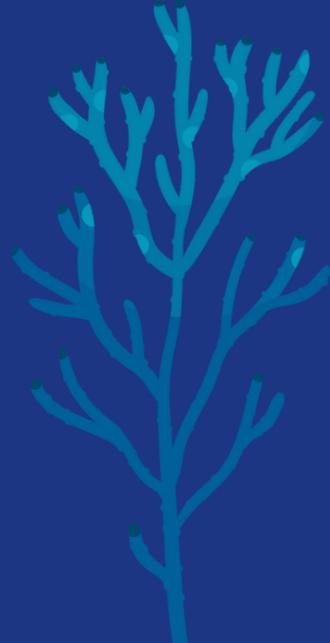
1. Bo'a, kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao, TNP Laut Sawu. Taksa target: Manta lautan (oceanic manta/Mobula birostris).
2. Perairan Sulamu-Semaw, Kota dan Kabupaten Kupang, TNP Laut Sawu. Taksa target: Lumba-lumba.
3. Yefnabi Kecil, Desa Meosmanggara, Distrik Waigeo Barat, SAP Raja Ampat. Taksa target: Manta lautan dan manta karang (reef manta/Mobula alfreadi).
4. Pangsa pasar utama yang ditargetkan dalam pengembangan wisata dan industri penunjangnya adalah masyarakat lokal, pihak universitas, wisatawan domestik, dan wisatawan internasional.

Paket Kegiatan 4.

h. Internal Workshop Penguatan Tim Platform ICM.

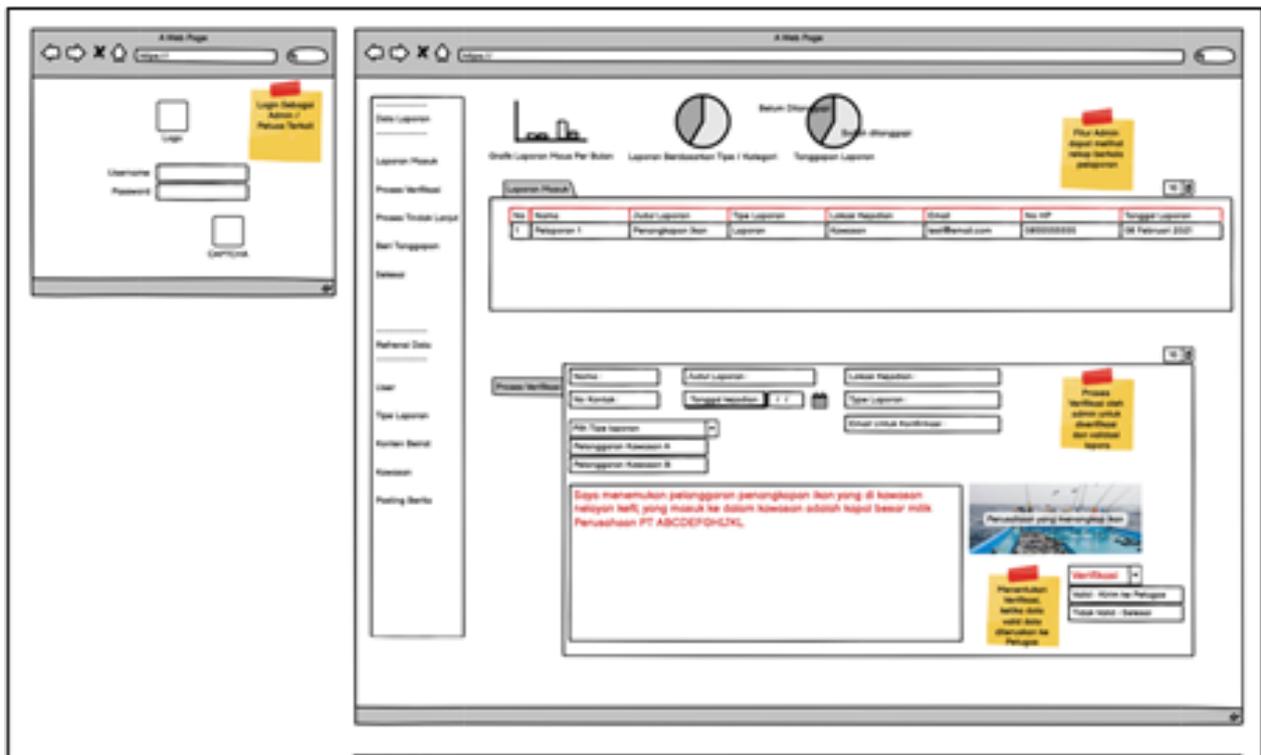
Sebagai bagian dari kegiatan paket 4 pada Output 1.1 yaitu Platform Tata Kelola Pengelolaan Pesisir Terpadu, PKSPL menyelenggarakan Internal Workshop Penguatan Tim Platform ICM, yang dilanjutkan dengan Rapat Penyusunan Pelaporan Hasil Kajian pada tanggal 15-16 Januari 2021, bertempat di Bogor.

Dalam kegiatan ini, Dr. Ir. Luky Adrianto, M.Sc selaku Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB turut hadir dan memberikan materi mengenai platform pengelolaan wilayah pesisir terpadu: isu strategis, peluang, dan tantangan. Rapat ini dilakukan sebagai diskusi internal pendahuluan dalam penyusunan platform tata Kelola pengelolaan pesisir terpadu yang akan dibahas lebih lanjut dengan pemangku kepentingan kunci, antara lain Bappenas, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepala Daerah, dan dinas terkait di lingkungan Provinsi Papua Barat.



Gambar 1.a.13 Pemaparan materi pada Internal Workshop oleh Dr. Ir. Luky Adrianto, M.Sc

i. Evaluasi Implementasi RZWP-3-K Papua Barat.



Gambar 1.a.14 Mockup aplikasi monitoring dan Evaluasi RZWP-3-K Papua Barat

Salah satu output dari PKSPL-IPB untuk program COREMAP-CTI World Bank adalah tersedianya aplikasi yang dapat digunakan sebagai alat untuk monitoring dan evaluasi implementasi RZWP-3-K Papua Barat. Pada tanggal 16 Februari 2021 PKSPL mengadakan kegiatan rapat koordinasi dengan tim konsultan untuk pengembangan aplikasi tersebut. Rapat koordinasi tersebut difokuskan untuk menyamakan persepsi terkait sistem informasi monitoring yang akan dibangun, koordinasi penyusunan draft SRS (*software requirement specification*) untuk pembuatan sistem serta mengidentifikasi meta data untuk konten sistem dan pematangan bisnis proses. Aplikasi ini diharapkan dapat digunakan sebagai alat monitoring oleh para pemangku kepentingan di Papua Barat untuk melihat kesesuaian pemanfaatan/penggunaan kawasan dengan RZWP-3-K Papua Barat.

j. Pembentukan Kelompok Konservasi dan Rehabilitasi Ekosistem Kritis di Masyarakat.

Hasil kajian mendalam penilaian ekosistem kritis yang dilakukan oleh PKSPL IPB pada 14–17 November 2020, menyebutkan bahwa Kampung Yensawai Barat, Distrik Batanta Utara terpilih sebagai lokasi untuk implementasi program Desain Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Dalam Mendukung Percepatan Pelaksanaan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Papua Barat melalui kegiatan rehabilitasi ekosistem pesisir. Sebagai tindak lanjut, pada tanggal 9–10 Maret 2021 PKSPL IPB mengadakan kegiatan inisiasi pembentukan kelompok konservasi di masyarakat Kampung Yensawai Barat, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Kelompok tersebut nantinya akan berperan sebagai implementor dari program rehabilitasi ekosistem pesisir.



Gambar 1.a.15
Kelompok Pengelola Ekosistem
Terumbu Karang Kampung
Yensawai

Dari kegiatan tersebut terbentuk 3 kelompok konservasi ekosistem pesisir dengan masing-masing kelompok mempunyai fokus terhadap ekosistem pesisir yang berbeda, berikut ke 3 (tiga) kelompok tersebut:

1. Kelompok Pengelola Ekosistem Terumbu Karang Kampung Yensawai, fokus terhadap konservasi dan rehabilitasi ekosistem terumbu karang;
2. Kelompok Korbon Kampung Yensawai, fokus terhadap konservasi dan rehabilitasi ekosistem mangrove;
3. Kelompok Andoi Kampung Yensawai, fokus terhadap konservasi dan rehabilitasi ekosistem lamun.

Anggota kelompok dari masing-masing kelompok tidak hanya berasal dari Kampung Yensawai Barat saja, sebagian juga berasal dari masyarakat Kampung Yensawai Timur. Total jumlah anggota dari ke 3 kelompok tersebut sebanyak 63 orang yang terdiri dari orang dewasa, remaja, pelajar dan dari kalangan ibu-ibu.

Paket Kegiatan 5. k. Pembangunan Menara Pokmaswas.

Pembangunan Menara Pokmaswas menjadi kegiatan utama yang dilakukan oleh Terangi pada periode bulan Januari-Februari 2021. Pada Periode ini 2 menara pokmaswas masing-masing di Meosmanggara, SAP Raja Ampat dan Sabu Raijua, TNP Laut sawu progress pembangunannya telah selesai 100%. Sementara Menara Pokmaswas di KKPD Selat Dampier progress bulan ini berada pada tahap persiapan pembangunan yaitu pengiriman bahan bangunan dari Sorong menuju ke Lokasi Pembangunan di Kampung Sawandarek.



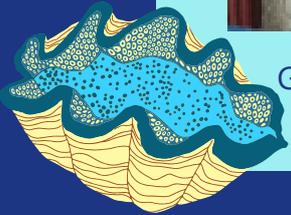
Gambar 1.a.16 Menara Pengawas di Meosmanggara, SAP Raja Ampat sudah selesai 100%.

Untuk Menara Pengawas di Rote Ndao, TNP Laut Sawu pada bulan Februari ini sudah ada kunjungan dari Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup sebagai syarat penerbitan SPPL. Berdasarkan laporan K3L periode Januari 2021, tidak terjadi kecelakaan kerja selama pembangunan infrastruktur tersebut. Hingga saat ini, dapat dikatakan tidak terdapat kendala yang berarti dalam proses pembangunan ketiga menara Pokmaswas tersebut. Rencana pembangunan keempat Menara Pokmaswas lainnya masih dalam tahap persiapan, seperti pengajuan dokumen SPPL dan persiapan lelang kontraktor.

I. Workshop Pengawasan Kawasan Konservasi Berbasis Masyarakat Level 1.



Gambar 1.a.18 Sambutan Bupati Sabu Raijua dalam kegiatan Workshop Pengawasan Berbasis Masyarakat Level 1.



Meningkatkan kapasitas SDM Pokmaswas dalam hal pengawasan merupakan salah satu output dari Paket kegiatan 5 COOREMAP-CTI World Bank yang diimplementasikan oleh Yayasan Terangi. Pada Tanggal 22 – 23 April 2021 Yayasan Terangi mengadakan kegiatan Workshop Pengawasan Kawasan Konservasi berbasis masyarakat level 1 tentang dasar-dasar pengawasan. Sasaran utama dari kegiatan ini adalah masyarakat anggota Pokmaswas yang berada di Kabupaten Sabu Raijua, total ada 15 peserta anggota pokmaswas yang terlibat aktif dalam kegiatan ini.

Materi yang disampaikan pada kegiatan workshop ini antara lain: kebijakan dan arahan pembinaan untuk kemandirian Pokmaswas; peran pokmaswas dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; operasi pengawasan di kawasan konservasi; pengenalan biota dilindungi dan biota berbahaya; status sumber daya ikan; serta kesehatan dan keselamatan kerja di laut. Kegiatan workshop ini akan dilakukan untuk Pokmaswas yang berada di Rote, Sumba dan Manggarai.

Paket Kegiatan 6.

m. Persiapan Musyawarah Adat dan Finalisasi Tim Formatur Pokja KMHA.

Salah satu output utama PILI adalah tersedianya Pokja KMHA untuk pengakuan dan perlindungan KMHA dalam pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir. Untuk itu, PILI melakukan persiapan musyawarah adat di Kab. Rote Ndao pada tanggal 20-21 Januari 2021 serta persiapan rapat tiga tungku di tingkat kampung pada tanggal 26-27 Januari 2021. Kedua kegiatan tersebut dilanjutkan dengan finalisasi tim formatur Pokja KMHA.

Berdasarkan hasil diskusi tersebut, untuk kegiatan di Rote, Forum Komunikasi Tokoh Adat Peduli Budaya masih melakukan persiapan untuk pelaksanaan musyawarah adat di bulan Februari 2021. Proses persiapan dilakukan dengan diskusi intensif dan juga membuat kategori pemilihan personil yang akan masuk dalam kepengurusan FKTAPB. Selain itu POKJA KMHA untuk Rote masih memerlukan pemahaman yang sama terkait dengan pengukuhan Nusak dan sistem papadak/hoholok yang pelaksanaannya di tiap nusak berbeda. Sementara untuk di Raja Ampat, masih perlu dilakukan persiapan dan mengawal kinerja tim formatur pokja KMHA untuk finalisasi mekanisme kerja dan juga proses SK POKJA KMHA dengan Bappeda Rote, DKP dan SAP Raja Ampat.



Gambar 1.a.19 Diskusi persiapan pelaksanaan musyawarah adat di Kabupaten Rote Ndao



n. FGD Pembentukan Kelompok Masyarakat di KMHA (Kelompok Masyarakat Hukum Adat) Kabupaten Rote Ndao & Raja Ampat

Sebagai langkah awal untuk mendukung pengelolaan perikanan berkelanjutan berbasis hak (Right-Based Sustainable Fisheries Management atau RB-SFM), pada tanggal 8–27 Februari Yayasan PILI mengadakan kegiatan serial FGD pembentukan kelompok masyarakat di KMHA Kabupaten Rote Ndao dan Raja Ampat. Kegiatan ini bertujuan untuk menginisiasi pembentukan kelompok masyarakat di KMHA Rote Ndao dan Raja Ampat. Detail serial FGD yang dilakukan sebagai berikut:

- FGD Pembentukan Kelompok Masyarakat di Desa Sotimori, Kabupaten Rote Ndao tanggal 8–10 dan 16–17 Februari 2021.
- FGD Pembentukan Kelompok Masyarakat di Desa Oelua, Kabupaten Rote Ndao tanggal 11–13 dan 18–20 Februari 2021.
- FGD Pembentukan Kelompok Masyarakat di Kampung Mutus, Kabupaten Raja Ampat tanggal 26–27 Februari 2021.

Gambar 1.a.20 FGD Pembentukan Kelompok di Desa Oelua



Hasil dari serial FGD tersebut adalah terbentuknya 11 kelompok masyarakat dengan rincian 4 kelompok di Kampung Mutus, 4 kelompok di Kampung Mutus Timur, 2 kelompok di Desa Oelua dan 1 kelompok di Desa Sotimori. Masing-masing kelompok sudah mempunyai mekanisme kerja kelompok serta sudah mendapatkan SK yang dikeluarkan oleh Desa/Kampung. Tahapan selanjutnya adalah penyusunan rencana pengelolaan perikanan berkelanjutan berbasis hak yang akan dilakukan secara partisipatif bersama kelompok-kelompok tersebut. Kelompok masyarakat ini juga diharapkan akan menjadi motor dalam mengimplementasikan RB-SFM di wilayah masing-masing.

o. FGD Revitalisasi Struktur Manaholo Sebagai Kelompok Masyarakat Pengawas Perairan Laut di Desa Oelua, Kabupaten Rote Ndao .

Kegiatan FGD Pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) melalui revitalisasi struktur Manaholo (Dewan Pengurus Adat) di Desa Oelua telah dilakukan pada tanggal 26 Maret 2021. Kegiatan ini dilakukan di Kantor Desa Oelua dengan jumlah narasumber dan peserta yang hadir yaitu 20 orang (19 laki-laki dan 1 perempuan) dari lembaga dan tokoh masyarakat, tokoh adat, BKKPN Kupang, Dinas Perikanan Kab. Rote Ndao, dan Yayasan PILI.



Gambar 1.a.21 FGD Revitalisasi Manaholo Desa Oelua

Hasil dari FGD ini adalah terbentuknya dua kelompok masyarakat pengawas perairan melalui manaholo di dua desa, 1 kelompok Manaholo di Desa Oelua dan 1 kelompok Manaholo di Desa Holulai. Kelompok-kelompok ini yang diharapkan dapat menjadi pionir dalam menerapkan pengelolaan perikanan berkelanjutan berbasis hak di wilayah masing-masing. Tahapan revitalisasi ini baru sampai pada tahap pengesahan dan belum dilakukan pengukuhan. Pengukuhan manaholo yang baru akan dilakukan setelah pengukuhan kepengurusan Forum Komunikasi Tokoh Adat Peduli Budaya (FKTAPB).

B. COREMAP-CTI ASIAN DEVELOPMENT BANK

Memasuki triwulan pertama tahun 2021, Program COREMAP CTI ADB melanjutkan proses pengadaan perusahaan konsultan untuk mengerjakan Paket Pekerjaan (Grant Package) di tiga lokasi proyek, yaitu Nusa Penida, Bali, serta Gili Matra dan Gili Balu, Nusa Tenggara Barat. Kemudian pengadaan konsultan individu dan pelaksanaan program beasiswa Master Program di University of Queensland, Australia melalui universitas sponsor di Indonesia, yaitu IPB University.

Berikut ini adalah progress kegiatan pada Triwulan 1 tahun 2021 (Januari – Maret 2021) COREMAP-CTI ADB:

1. Proses pengadaan Perusahaan Konsultan

GP1

Grand Package One

- Pada akhir tahun 2020, ULP Bappenas telah menetapkan PT Trans Intra Asia (TIA) sebagai perusahaan konsultan pelaksana pekerjaan, namun proses penandatanganan kontrak belum dapat dilakukan.
- Pada 13 Januari 2021, penandatanganan kontrak untuk GP-1 sudah dapat dilakukan antara PT TIA dengan PPK Proyek COREMAP CTI tahun 2021.
- Selanjutnya, pada tanggal 3 Maret 2021 PT TIA sudah menyampaikan presentasi laporan pendahuluan (*inception report*).

GP2

Grand Package Two

- ULP telah menetapkan PT Duta Cipta Mandiri (DCM) sebagai perusahaan pelaksana dan telah memasukkan proposal pada tanggal 4 Maret 2021. Selanjutnya ULP Bappenas melakukan evaluasi terhadap proposal teknis dan proposal keuangan.

GP3

Grand Package Three

- Pada bulan Januari 2021, ULP menetapkan PT Ciria Bangun Aghna (CBA) sebagai perusahaan pelaksana untuk GP-3 lokasi Gili Balu.
- Saat ini, ADB telah mengeluarkan surat persetujuan NOL untuk bertanda tangan kontrak dan melakukan mobilisasi konsultannya.

GP4*Grand
Package
Four*

- Pada bulan Januari 2021, ULP telah menetapkan Coral Triangle Centre (CTC) sebagai perusahaan pelaksana paket 4 lokasi Nusa Penida.
- ULP, Bappenas ICCTF dan CTC telah melakukan Kontrak Negosiasi namun belum mendapat persetujuan (NOL) dari ADB untuk tanda tangan kontrak

GP5*Grand
Package
Five*

- ULP telah menetapkan PT Duta Cipta Mandiri (DCM) sebagai perusahaan pelaksana dan telah memasukkan proposal pada tanggal 4 Maret 2021. Selanjutnya ULP Bappenas melakukan evaluasi terhadap proposal teknis dan proposal keuangan.

GP6*Grand
Package
Six*

- ULP telah menetapkan PT Sucofindo (Persero) sebagai pelaksana pekerjaan GP-6 lokasi Gili Balu.
- Pada tanggal 5 Maret 2021, dokumen kontrak telah ditanda tangani dan Tim Sucofindo sudah mulai melakukan mobilisasi konsultannya.

GP7*Grand
Package
Seven*

- ADB telah mengeluarkan persetujuan untuk mulai melakukan pengumuman kepada calon peserta tender. Adapun metode untuk pengadaan konsultan paket 7 adalah QCBS yang memerlukan proses yang lebih panjang.

2. Pengadaan konsultan Individu

Pada tanggal 18 Februari 2021, Sekretariat ICCTF telah melayangkan pengumuman pengadaan konsultan individu untuk posisi: Procurement Specialist, Monev Officer, Creative Officer, Site Coordinator di lokasi proyek yaitu Nusa Penida, Gili Matra dan Gili Balu.

Pada tanggal 8 Maret 2021, tiga konsultan Site Coordinator sudah melakukan kontrak negosiasi dan dalam proses pengajuan persetujuan untuk melakukan kontrak.

Untuk tiga posisi yang lain, masih dalam proses seleksi yaitu Monev Officer, Creative Officer dan Procurement Officer.

3. Program Beasiswa Master Degree

ICCTF – Bappenas telah membuka kesempatan kepada empat calon mahasiswa untuk mengikuti program *Beasiswa Master Degree di Univeristy of Queensland, Australia*. Pada akhir tahun 2020, terdapat dua orang calon mahasiswa telah mendaftarkan diri melalui sistem registrasi online, namun hingga akhir bulan Januari 2021, baru bertambah satu orang calon mahasiswa. Progress beasiswa program master pada kuartal pertama tahun 2021 adalah sebagai berikut:



- Pada tanggal 26 Januari 2021, tiga orang calon mahasiswa sudah mengikuti *Pre-Departure Course (PDC)* yang dipandu oleh Tim Pengajar dari IPB secara online.
- Pada tanggal 22 Februari 2021, tiga mahasiswa sudah mengikuti perkuliahan di *University of Queensland, Australia* secara online.
- Pada tanggal 19 Maret telah dilaksanakan koordinasi beasiswa master program antara ICCTF, IPB, dan ketiga mahasiswa.

Dalam pelaksanaannya di kuartal tiga, ketiga mahasiswa menyampaikan terdapatnya beberapa kendala dalam perkuliahan secara online, yaitu kendala dalam mata kuliah khusus yaitu GIS dimana mahasiswa diharuskan memiliki perangkat dengan spesifikasi computer yang dapat mendukung penggunaan software GIS yang sesuai. Saat ini kendala sudah dapat diatasi dan merasa sudah terbiasa dengan metode kuliah secara online.

Kendala lain yang masih perlu diselesaikan terkait kontrak beasiswa antara IPB dengan mahasiswa, dimana hingga bulan Maret 2021 masih belum ada kejelasan terkait alokasi yang tercantum dalam kontrak beasiswa. Selain itu perlu dikonfirmasi ke University of Queensland terkait lokasi ujian dimana di salah satu sumber informasi disebutkan untuk Indonesia, hanya dapat dilakukan di Jakarta, maka perlu antisipasi terkait hal tersebut.

TIMEFRAME PERKULIAHAN (KALENDER AKADEMIK)  UNIVERSITY OF QUEENSLAND

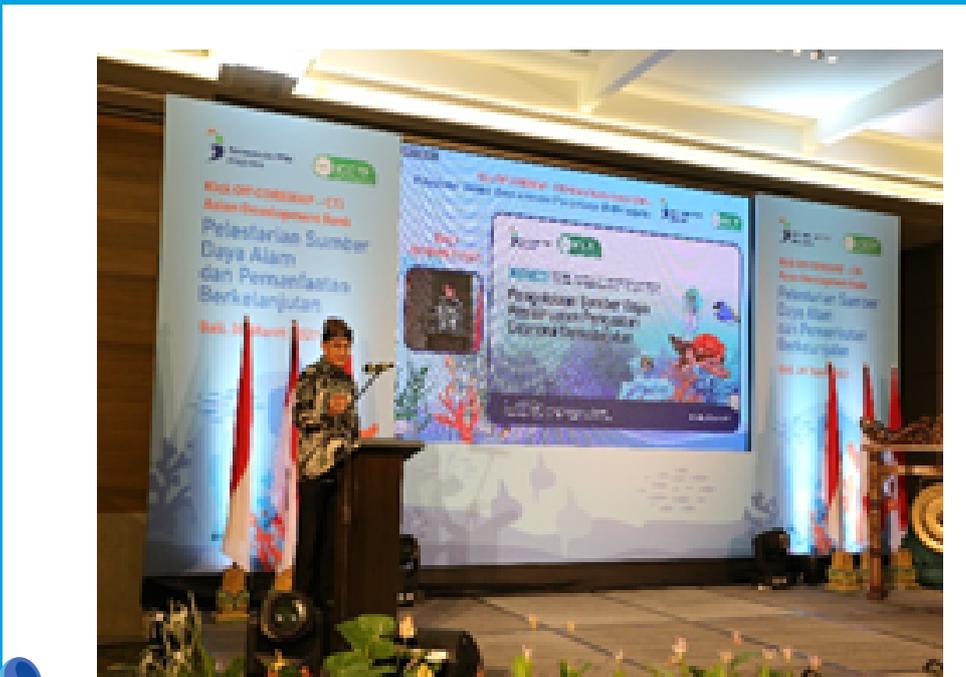
Februari 2021						
Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu
26 Januari – 13 Februari 2021 Pre Departure Course IPB					6	7
15 – 19 Februari 2021 Orientation Week – University of Queensland					13	14
22 Februari 2021 Mulai Perkuliahan Semester 1, 2021 University of Queensland					20	21
					27	28



4. Kick-off COREMAP-CTI ADB Bali

Pelaksanaan acara Kick Off COREMAP CTI ADB dilakukan pada tanggal 30 Maret 2021 bertempat di Hotel Ritz Carlton, Nusa Dua, Bali. Sebagai tuan rumah, Sekretaris Daerah, dalam hal ini diwakili oleh Bapak I Gede Indra Dewa Putra, SE, MM selaku Asisten 1, Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Provinsi Bali memberikan kata sambutan pembukaan.

Dalam sambutannya, beliau menyampaikan kondisi terakhir sektor pariwisata di Provinsi Bali yang cukup terdampak secara signifikan. Sebagai jalan keluarnya, masyarakat memulai usaha dalam pengelolaan sumber daya hasil laut. Nusa Penida sebagai icon pariwisata bahari merasakan tantangan yang cukup berat akibat hilangnya pendapatan dari sektor Pariwisata dan mulai beralih pada usaha budidaya rumput laut. Beberapa kepala keluarga nelayan sudah memulai kembali usaha rumput laut yang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan.



Gambar 1.b.1 Sambutan Sestama PPN/Bappenas

Selanjutnya, Sekretaris Utama (Sestama) Kementerian PPN/Bappenas, Himawan Hariyoga Djojokusumo menyampaikan sambutan kunci (*keynote Speaker*) acara kick off.

Potensi Sumber daya Terumbu karang Indonesia dimana dapat ditemukan sebanyak 39% jenis ikan karang yang ada diseluruh dunia; dengan luas karang mencapai 14% dari luas terumbu karang diseluruh dunia serta terdapat 596 jenis karang.

Sestama Bappenas RI juga menyampaikan himbauan bahwa perairan di Propinsi Bali dan Propinsi NTB memiliki terumbu karang dengan keanekaragaman tinggi, sehingga kita perlu berkomitmen untuk menjaganya. Himbauan juga disampaikan untuk membangun kolaborasi para pihak untuk mendukung Program COREMAP-CTI sehingga terbangun pemahaman dan juga kesepahaman bersama dalam pengelolaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan terutama tentang program COREMAP-CTI khususnya pendanaan Asian Development Bank.

Secara resmi, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas RI, Arifin Rudyanto, menyampaikan pidato Pembukaan kick off COREMAP-CTI ADB. Dalam sambutannya mengingatkan kontribusi ekosistem terumbu karang yang sehat sebesar 2,6M USD pertahun untuk Indonesia, data yang diperoleh dari UNEP, tahun 2018. Sehingga program COREMAP-CTI di Indonesia menjadi penting untuk didukung melalui strategi penguatan kelembagaan, pengelolaan berbasis masyarakat, pengawasan dan penegakan hukum serta penyadaran masyarakat.



Gambar 1.b.2 Pembukaan Kick-off ADB oleh Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam



Gambar 1.b.3 Pemukulan gong sebagai simbol Kick-off

Pemukulan gong oleh Sekretaris Utama Bappenas RI menjadi simbol penanda dimulainya pelaksanaan kegiatan COREMAP-CTI bantuan ADB di lokasi Nusa Penida, Gili Matra dan Gili Balu. Berkenan mendampingi Sekretaris Utama Bappenas adalah Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Bappenas RI, Sekretaris Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Asisten 1 Pemerintah Provinsi Bali, serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.



Sehingga diharapkan program COREMAP-CTI menjadi salah satu pengungkit dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 bagi masyarakat pesisir, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian terumbu karang dan ekosistem pesisir secara berkelanjutan.

Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas RI, Dr. Sri Yanti menyampaikan bahwa pada tahun 2019 Bappenas melalui ICCTF telah dipercaya untuk mengelola Proyek COREMAP-CTI dengan pendanaan hibah yang berasal dari Global Environmental Facility (GEF) yang disalurkan melalui Bank Dunia (World bank) dan Asian Development Bank (ADB).



Gambar 1.b.4 Penutupan oleh Direktur Kelautan dan Perikanan
Kementerian PPN / Bappenas

Program COREMAP-CTI Bantuan ADB yang diimplementasikan pada periode Maret 2020 hingga Desember 2022 dengan total bantuan Proyek adalah USD 5,2 Juta, dengan tujuan utamanya adalah meningkatkan 10% efektifitas pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) di Lesser Sunda khususnya di tiga lokasi proyek, yaitu Nusa Penida (Bali), Gili Balu dan Gili Matra (NTB). Dimana melalui pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Mitra Pelaksana Proyek, efektifitas pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) mencapai 80% kategori Biru di Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida, 80% Kategori Biru untuk Kawasan Gili Matra dan 100% Kategori Hijau untuk Kawasan Taman Pulau Kecil (TPK) Gili Balu, NTB.

4. Safeguard Induction

Pada tanggal 31 Maret 2021 telah dilaksanakan Induction Social and Environmental Safeguard serta Gender secara luring di Nusa Dua Bali dan secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini dihadiri oleh Bu Helena dari ADB, Pak Dennie Mamonto sebagai Environmental Safeguard Specialist, Bu Indah Setyawati sebagai Social Safeguard Specialist, Bu Riana sebagai Gender Specialist, dan staff ICCTF serta Mitra Pelaksana. Kegiatan dibuka oleh Bu Helena dari ADB dan dilanjutkan oleh paparan dari para expert serta diskusi tanya-jawab. Kesimpulan dan tindak lanjut dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.b.1 Daftar Kegiatan Tindak lanjut pelatihan safeguard dan gender.

NO	TINDAKLANJUT	PIC	JANGKA WAKTU
1	Menyusun beberapa dokumen <i>safeguard</i> , antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Indigenous People Plan</i> • <i>Resettlement Plan</i> <i>Environmental Management Plan / Initial Environmental Examination</i>	ICCTF	Q2 2021
2	<i>Mematuhi dan mengimplementasikan social & environmental standard serta gender action plan dan melakukan pengambilan data untuk kebutuhan pelaporan social & environmental safeguard, serta gender action plan.</i>	Mitra Pelaksana	Pertengahan April 2021 dan sepanjang siklus hidup proyek
3	<i>Melakukan monitoring dan reporting penerapan social & environmental safeguard, serta gender action plan</i>	ICCTF	Sepanjang proyek setiap semester
4	<i>Menyusun Mekanisme Penanganan Keluhan</i>	ICCTF berkoordinasi dengan mitra pelaksana dan pemangku kepentingan kunci	Sesegera Mungkin

C. BLENDED FINANCE

Pada periode Q1 2021, ICCTF melanjutkan upaya untuk mengakselerasi inisiatif *Blended Finance* di sektor kelautan dan perikanan melalui *Sustainable Blue Financing Institution* (SBFI). Kegiatan yang dilaksanakan adalah tindak lanjut penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara Kementerian PPN/Bappenas dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memulai inisiatif pendanaan inovatif dalam rangka pencapaian Tujuan Pembangunan Bersama (TPB) pada tanggal 16 Desember 2020 yang lalu.

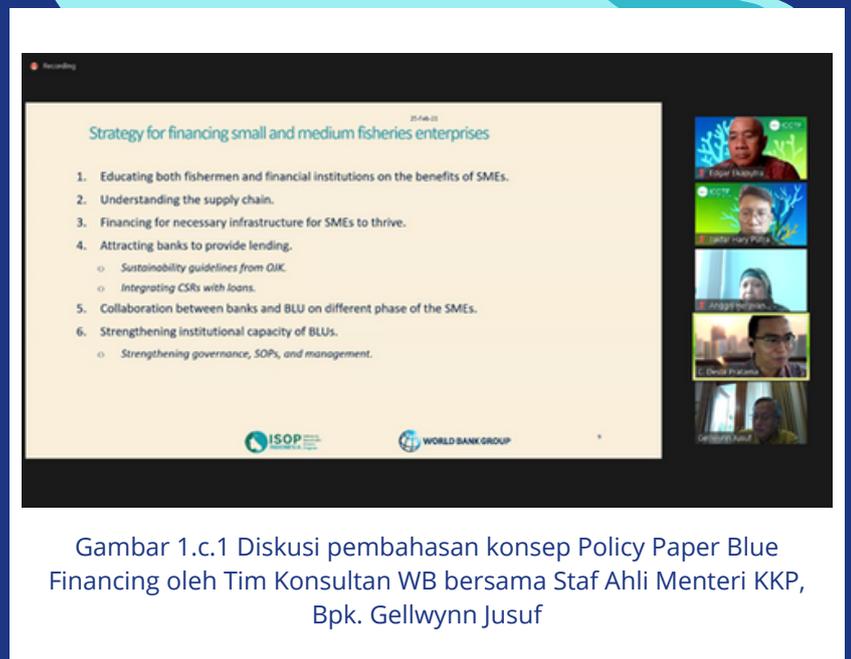
Upaya kerja sama tersebut telah dimulai sejak pertengahan tahun 2020 dan baru terwujud di periode Q4 2020 dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama tentang Kolaborasi Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Sektor Kelautan dan Perikanan melalui Dukungan Sustainable Blue Financing. Selain itu, dalam rangka mematangkan konsep pelaksanaan Blue Finance di Indonesia, kerja sama ICCTF dengan World Bank melalui Problue dalam penyusunan Peta Jalan (Roadmap) Blue Finance juga terus berjalan. Secara lebih detail, kegiatan dalam window *Blended Finance* disajikan dalam deskripsi berikut:

1. Inisiasi Blue Financing di bawah Problue - World Bank

Pada periode Q1 2021, agenda yang direncanakan di bawah kerangka kerja Problue yaitu penyusunan Policy Paper Blue Financing, yang akan memuat strategi pendanaan inovatif bagi kegiatan di bidang kelautan dan perikanan yang meliputi pengembangan perikanan berkelanjutan, pengelolaan kawasan konservasi laut dan implementasi karbon biru. Penyusunan Policy Paper ini akan terus berlanjut hingga periode Q2 2021 dan ditargetkan untuk rilis pada awal Q3 2021 mendatang.

Hingga bulan Maret 2021, konsep awal Policy Paper ini telah disusun dengan judul "Blue Finance Policy Note: Financing options for small-medium fisheries enterprise and marine conservation in Indonesia". Policy Paper tersebut akan memuat beberapa bagian, pertama adalah penjelasan mengenai pentingnya blue economy dan kebutuhan blue financing di Indonesia sebagai negara maritim, Bagian kedua akan memuat berbagai perspektif, hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam blue financing. Berikutnya bagian ketiga akan menjelaskan tentang perkembangan blue financing di Indonesia yang telah dilaksanakan oleh berbagai inisiatif dan lembaga baik pemerintah, swasta, NGO/CSO, perbankan dan mitra pembangunan.

Untuk bagian keempat menjelaskan faktor kunci dalam pendanaan yang dilihat dari studi kasus pada pengusaha perikanan skala kecil menengah dan konservasi laut. Bagian kelima berupa rekomendasi strategi pendanaan bagi pengusaha perikanan skala kecil menengah dan bagian keenam berupa rekomendasi strategi pendanaan bagi pengelolaan konservasi laut. Selanjutnya bagian terakhir adalah usulan Roadmap bagi pengembangan blue financing dalam jangka waktu pendek, menengah dan panjang.



Gambar 1.c.1 Diskusi pembahasan konsep Policy Paper Blue Financing oleh Tim Konsultan WB bersama Staf Ahli Menteri KKP, Bpk. Gellwynn Jusuf

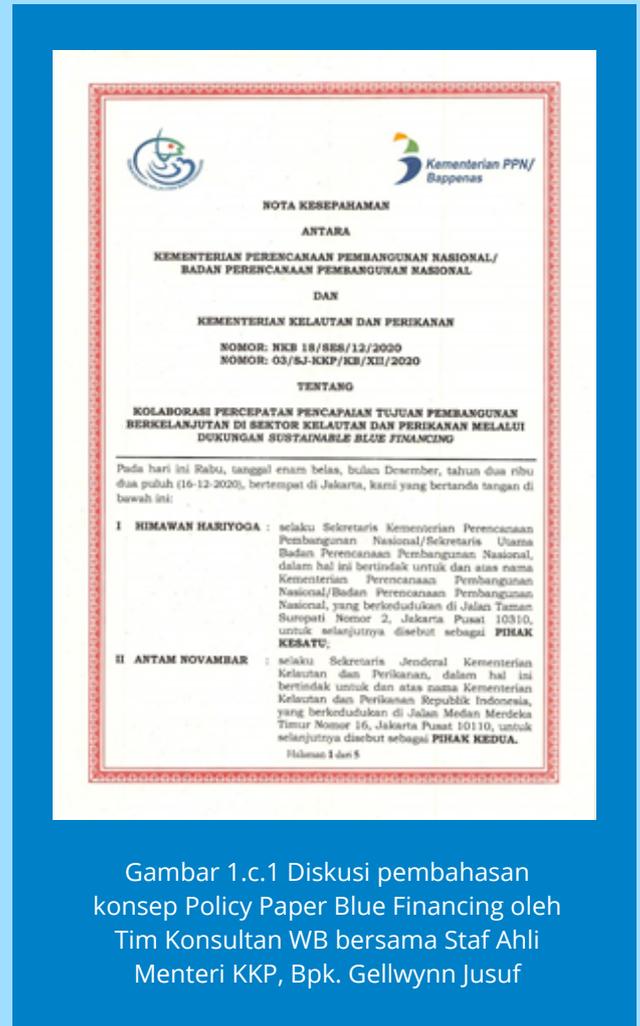
Konsep Policy Paper Blue Financing yang disusun oleh Tim konsultan WB dan ICCTF telah disampaikan kepada Task Tim Leader Blue Program di World Bank pada akhir Maret 2021 untuk mendapatkan tanggapan dan masukan. Selain itu, sebagai rangkaian dari program kerja Problue, telah disusun pula usulan rencana pilot project Blue Financing di Gorontalo, NTT dan NTB untuk akses pendanaan hibah LAUTRA pada bulan Februari 2021. Usulan ini telah disampaikan kepada Tim KKP penyusun proposal LAUTRA pada tanggal 2 Maret 2021 untuk masuk dalam dokumen Readiness Criteria yang akan disampaikan kepada Bappenas pada tanggal 4 Maret 2021.

Selanjutnya, secara lebih detil penetapan lokasi project LAUTRA tersebut dibahas bersama KKP pada tanggal 10 Maret 2021 untuk disesuaikan dengan kriteria yang telah ditentukan oleh KKP. Akhirnya setelah melakukan diskusi dan penyesuaian kriteria maka disepakati lokasi pilot bagi Blue Financing pada proposal Lautra adalah Papua Barat, Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Sebagai tindak lanjut kegiatan Problue, perlu dilakukan review dan memberikan masukan terhadap Draft Policy Paper Blue Financing oleh ICCTF dan WB untuk disempurnakan pada Q2 2021 mendatang.

2. Inisiasi Kerjasama terkait Sustainable Blue Financing dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Menindaklanjuti Nota Kesepahaman Bersama yang resmi ditandatangani pada tanggal 16 Desember 2020 oleh Kementerian PPN/Bappenas, yang diwakilkan oleh Sekretaris Kementerian PPN/ Sekretaris Utama Bappenas, dan dari pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan diwakilkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka perlu disusun suatu Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara unit teknis di Bappenas dan KKP (Eselon II).

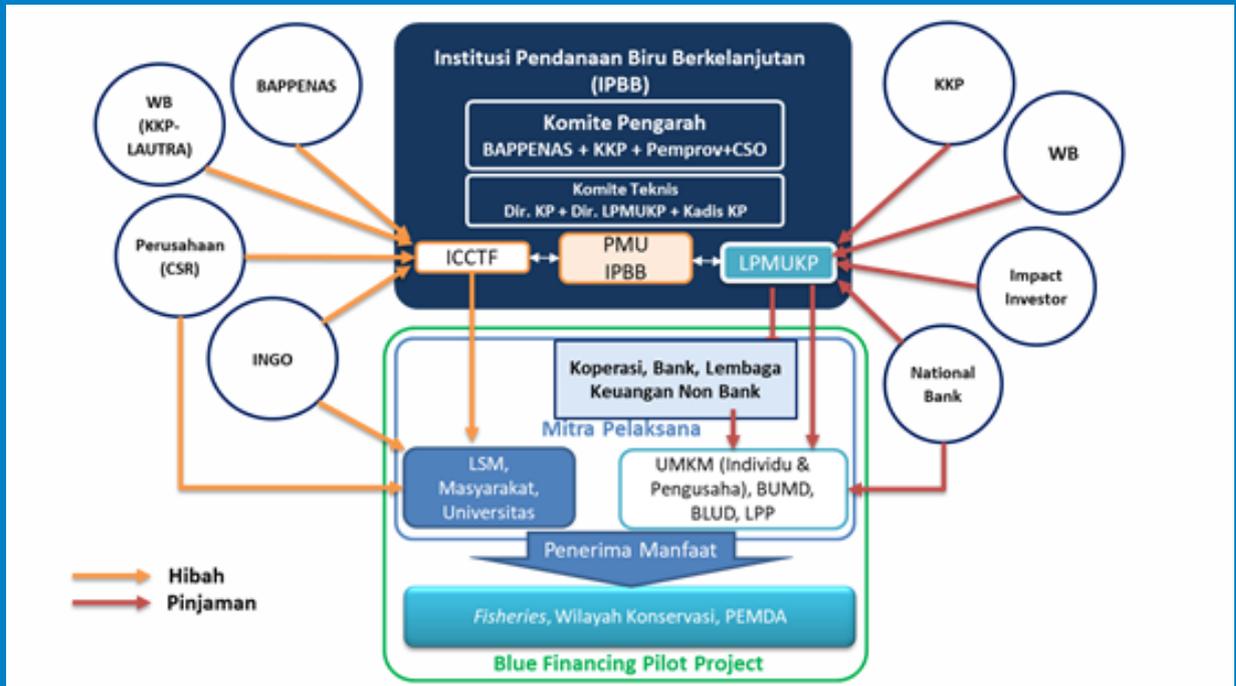
Nota Kesepahaman Bersama ini akan menjadi pintu sekaligus landasan dalam memulai kegiatan-kegiatan pendanaan inovatif di sektor kelautan dan perikanan yang diturunkan dalam SPK yang lebih teknis.



Gambar 1.c.1 Diskusi pembahasan konsep Policy Paper Blue Financing oleh Tim Konsultan WB bersama Staf Ahli Menteri KKP, Bpk. Gellwynn Jusuf

Menindaklanjuti Nota Kesepahaman Bersama yang resmi ditandatangani pada tanggal 16 Desember 2020 oleh Kementerian PPN/Bappenas, yang diwakilkan oleh Sekretaris Kementerian PPN/ Sekretaris Utama Bappenas, dan dari pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan diwakilkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka perlu disusun suatu Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara unit teknis di Bappenas dan KKP (Eselon II).

Nota Kesepahaman Bersama ini akan menjadi pintu sekaligus landasan dalam memulai kegiatan-kegiatan pendanaan inovatif di sektor kelautan dan perikanan yang diturunkan dalam SPK yang lebih teknis



Gambar 1.c.3 Skema kerja sama ICCTF dan BLU LPMUKP dalam skema Institusi Pendanaan Biru Berkelanjutan

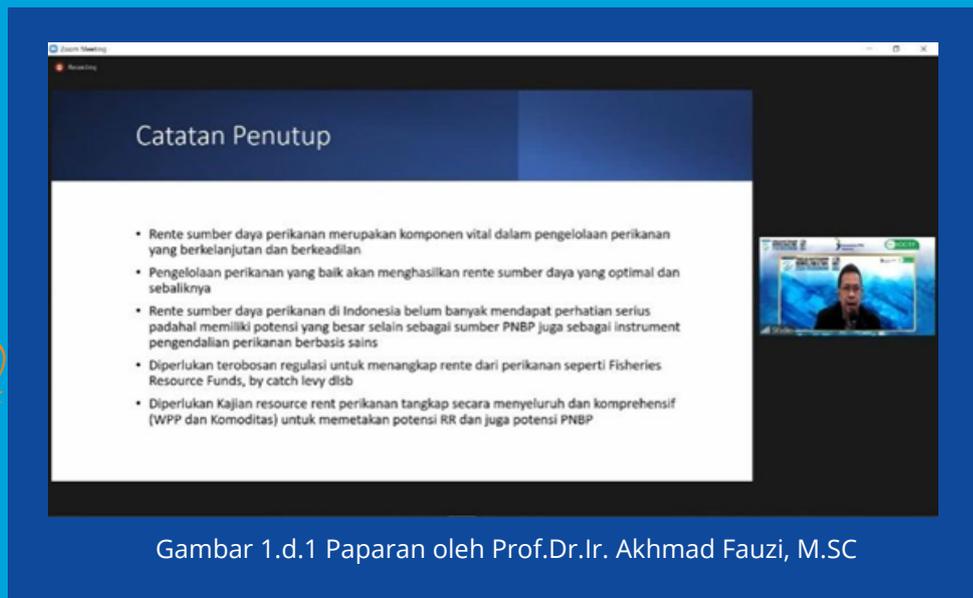
Langkah berikutnya dari SPK tersebut adalah pelaksanaan pilot proyek. Pilot proyek ini diharapkan dapat menjadi percontohan implementasi dan pengarusutamaan pendanaan inovatif di sektor kelautan dan perikanan. Pilot pendanaan inovatif ini akan menggapai sektor dan skala usaha dari berbagai tingkat, serta meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pendanaan inovatif.

Pelaksanaan Pilot ini akan mulai dijangki setelah SPK ditandatangani dan menunggu ketersediaan dana baik dari APBN maupun mitra pembangunan (melalui LAUTRA) atau sumber pendanaan lainnya. Diperkirakan pembahasan pilot proyek ini akan mulai dilakukan pada Q3 2021 mendatang.

D. PENELITIAN BIOEKONOMI

Setelah pembahasan hasil penelitian, finalisasi hasil kajian dalam bentuk laporan, dan penyusunan rekomendasi kebijakan dengan para ahli, di periode Q1 tahun 2021 ini kegiatan Penelitian Bioekonomi difokuskan pada Seminar Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan: Studi Bioekonomi. Detil kegiatan yang dilakukan dalam rangka Penelitian Bioekonomi dipaparkan di bawah ini:

- **Seminar Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan: Studi Bioekonomi**



Pada tanggal 24 Maret 2021 telah dilaksanakan Seminar Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan: Studi Bioekonomi secara luring di Hotel Fairmont Jakarta dan daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Seminar ini bertujuan untuk: (i) Mendapatkan masukan tentang kegiatan yang dilakukan oleh Bappenas terkait dengan perencanaan pembangunan, untuk mendukung pemasukan PNBPN sektor perikanan secara berkelanjutan; dan (ii) Penyampaian hasil kajian Bioekonomi Perikanan Udang di Laut Arafura (WPP 718).

Kegiatan ini dibuka oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Dr. Ir. Arifin Rudiyanto, M.Sc. Hasil kajian Bioekonomi Perikanan Udang di Laut Arafura disampaikan oleh Prof. Dr. Ir, Akhmad Fauzi, M.Sc. Diskusi dimoderatori oleh Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas, Dr. Ir. Sri Yanti JS, MPM dengan penanggung jawab yaitu Dr. Purwito Martosubroto, M.Sc dan Dr. Ir. Gellwynn Jusuf, M.Sc. Kegiatan ini dihadiri oleh Perwakilan Kementerian/Lembaga terkait, Perwakilan Akademisi, Perwakilan NGO, Perwakilan Komnas Kajian, Perwakilan IMFISERN, dan Perwakilan Praktisi/Pakar.

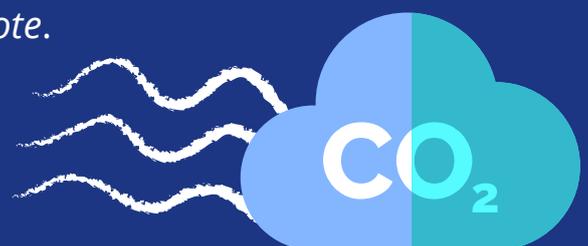
D. BLUE CARBON

Pada TA 2020 lalu, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bekerjasama dengan *Department of Industry, Innovation, Science and Resources* (DISER), Pemerintah Australia dalam inisiasi *The Indonesia-Australia Blue Carbon Program*. Program ini bertujuan untuk membangun pemahaman, mendorong kolaborasi dan meningkatkan pengelolaan ekosistem blue carbon untuk ketahanan perubahan iklim serta mendukung mata pencaharian masyarakat pesisir yang berkelanjutan.

Kerjasama dilakukan dalam rangkaian kegiatan *Policy Dialogue* yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan akademisi dalam memahami keterkaitan blue carbon di dalam RPJMN serta mengidentifikasi bagaimana kebijakan-kebijakan yang ada saat ini dapat berinteraksi atau mendukung satu sama lain. Tindak lanjut yang diharapkan adalah penyusunan peta jalan implementasi karbon sebagai arah pengembangan dan implementasi kebijakan di tingkat nasional dan daerah.

Untuk itu program *blue carbon* perlu diinternalisasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan perencanaan wilayah pesisir terpadu serta memasukkan program blue carbon ke dalam rencana strategis dan kerja Kementerian. Untuk TA 2021, program DISER sendiri meliputi Penyusunan *Inventory Guideline on Wetlands* yang bekerjasama dengan para *country expert* dan kegiatan *Policy Training* yang bekerjasama dengan CTC. *Inventory Guidelines* direncanakan selesai pada kuartal I ini dan nantinya akan dikirimkan kepada Kementerian-kementerian terkait untuk *proses review*.

Sedangkan untuk *Policy Training* saat ini materinya masih disusun namun telah diputuskan akan dilaksanakan secara daring. Selain kerjasama dengan Pemerintah Australia di atas, ICCTF juga melakukan koordinasi dengan AFD, Perancis untuk kerjasama dalam proyek *Eco Fishing Port*. Saat ini koordinasi dilakukan bersama dengan konsultan AFD salah satunya dalam penyusunan *concept note*.



Seluruh kegiatan tersebut adalah rangkuman kegiatan koordinasi yang dilakukan pada windows blue carbon. Untuk kuartal I ini belum ada kegiatan pertemuan atau workshop yang dilakukan. Kegiatan-kegiatan tersebut akan dimulai pada kuartal kedua TA 2021.

2. Program Strategis dan Penggalangan Dana (Fundraising)

2.1. Inisiasi Kerjasama dan Penggalangan Dana

Pada periode Q1 2021, ICCTF melanjutkan kolaborasi program-program strategis dan penggalangan dana dalam pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan, baik melalui diskusi inisiasi dengan mitra pembangunan maupun partisipasi dalam event dan forum diskusi. Beberapa rencana kerja sama yang diinisiasi oleh ICCTF pada periode ini, yaitu inisiasi bersama mitra pembangunan Asian Development Bank (ADB), Agence Française de Développement (AFD) dan World Bank (WB).

- **Tindak lanjut Kerjasama dengan Asian Development Bank (ADB)**

Menindaklanjuti inisiasi yang telah dilakukan oleh Bappenas dan ICCTF bersama Asian Development Bank (ADB) pada tanggal 21 Oktober 2020 yang lalu, telah dilakukan beberapa kali diskusi lanjutan pada Q1 2021 untuk menyiapkan proposal dari ADB kepada GEF untuk mendapatkan pendanaan hibah bagi program “Peningkatan Infrastruktur untuk Budidaya Udang/*Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture*”. Pertemuan pertama dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2021 secara virtual yang dihadiri perwakilan dari Bappenas, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), ICCTF dan ADB. Pada pertemuan tersebut, ADB menyampaikan bahwa proposal program ini akan disusun untuk mengakses pendanaan GEF 7 - *International Water: Objective - Strengthening Blue Economy Opportunities*. Dikarenakan International Water merupakan Non-STAR program GEF yang harus melibatkan negara lain dalam skala regional maka diusulkan untuk melibatkan Timor Leste dalam program ini. ADB akan menyiapkan konsultan untuk menyusun proposal program ini. Rencananya proposal dalam bentuk GEF Concept note (PIF) akan disampaikan pada bulan September 2021 pada 61st GEF Council Work Program.



Pada pertemuan ke dua tanggal 24 Februari 2021, perwakilan ADB untuk program di Timor Leste turut bergabung dalam diskusi virtual untuk memberikan masukan dan tanggapan. Dari diskusi ini diketahui bahwa terdapat beberapa project dibidang kelautan dan perikanan yang berlokasi di wilayah Indonesia timur dan beririsan dengan Timor Leste antara lain ATSEA and ISLME yang dilaksanakan oleh mitra pembangunan lainnya. Sebagai tindak lanjut ADB akan membangun komunikasi dengan project tersebut untuk memperkaya penyusunan proposal. Selain itu, direncanakan pada pertemuan selanjutnya akan mengundang perwakilan pemerintah Timor Leste untuk mengetahui pandangan dan tanggapannya.



Pada awal Maret 2021, ICCTF telah melakukan komunikasi informal dengan perwakilan pemerintah Timor Leste. Dari hasil komunikasi tersebut diketahui bahwa budidaya udang di Timor Leste belum menjadi program prioritas bagi pemerintahnya, diusulkan program bagi Timor Leste ini untuk dapat mengakomodir komoditas perikanan prioritas lainnya seperti Bawal dan Nila. Selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2021 di Margo Hotel Depok, Bappenas, KKP dan ICCTF melaksanakan pembahasan untuk mendetailkan proposal program tersebut. Judul proposal telah direvisi menjadi “Sustainable Shrimp Aquaculture Value Chain Development” sebagaimana project digest pada Tabel 2.a.1 berikut.

Tabel 2.a.1 Project Digest Proposal Kerjasama Bappenas, KKP dan ADB tentang Shrimp Aquaculture.

Project Title	Sustainable Shrimp Aquaculture Value Chain Development
Project Duration	3 (three) years, 2022 – 2024
Target Location	1. Indonesia 2. Timor Leste (TBC)
Proposed Budget	Grant - USD 8.000.000
Donor	The Global Environment Facility (GEF) - the International Waters (IW) Focal Area
GEF Agency	Asian Development Bank (ADB)
Executing Agency	Ministry of Marine and Fisheries
Implementing Agency	1. Directorate General of Aquaculture, Ministry of Marine and Fisheries 2. Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF), Ministry of National Development Planning/Bappenas

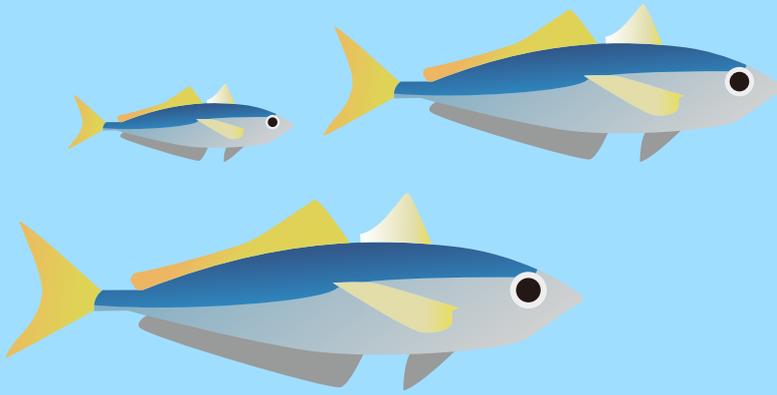
Program ini rencananya akan dikelola oleh KKP sebagai Executing Agency. Diusulkan lokasi program di Indonesia dan Timor Leste dengan periode program selama 3 tahun (2022-2024). Total pendanaan proyek ini akan mencapai USD 8 juta dari pendanaan hibah GEF, dimana USD 5 Juta untuk Indonesia dan USD 3 Juta untuk Timor Leste. Kementerian PPN/Bappenas melalui ICCTF akan menjadi salah satu Implementing Agency bersama Direktorat Jenderal Budidaya untuk mengelola pendanaan hibah tersebut. Secara program, proposal ini akan mempertimbangkan ketentuan dari ADB berupa *transboundary project (regional)*, mengadopsi *full value chain approach* dan *ecosystem approach* serta mengembangkan *business case* yang mengintegrasikan *environment, social and governance elements (ESG)*. Sebagai tindak lanjut dari rencana kerjasama ini akan dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu:

1. Menambahkan referensi dalam MOU / *Aide Mémoire "Efforts will be made to explore grant co-financing from various sources..."*
2. Bappenas & KKP akan melakukan pertemuan dengan GEF Operational Focal Point (Ibu Laksmi) di KLHK sebelum mengirimkan surat resmi (April 2021)
3. Sekretaris Jenderal KKP akan mengirimkan surat resmi kepada GEF *Operational Focal Point* untuk menyampaikan rencana pengajuan proposal melalui pembiayaan bersama GEF
4. Menyusun TOR dan melibatkan ADB/GEF Senior *Aquaculture Value Chain Specialist* untuk menyusun *concept note* untuk *multi-country project (INO/TIM)*
5. Target pengajuan *concept note* GEF (PIF) pada September 2021 untuk 61st GEF Council Work Program.

2. 2. Inisiasi Kerjasama dan Penggalangan Dana

Menindaklanjuti rangkaian pertemuan dengan AFD pada bulan September-Oktober 2020, telah disusun DUK dan DIPK untuk program hibah yang berjudul "Technical Assistance to Outer Ring Fishing Ports Development (Eco Fishing Port)", Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menjadi Executing Agency sedangkan Implementing Agency nya adalah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap - KKP dan Kedeputan Kemaritiman dan Sumber Daya Alam - Kementerian PPN/Bappenas. Rencananya program ini akan dilaksanakan pada 4 lokasi, yaitu Sumatera Utara (PPS Belawan), Sulawesi Utara (PPS Bitung), Sulawesi Tenggara (PPS Kendari) dan Babel (PPN Sungai Liat) selama tahun 2022 - 2024. Total pendanaan hibah proyek ini sebesar USD 2.155.000.

Kementerian PPN/Bappenas melalui ICCTF rencananya akan melaksanakan 2 (dua) komponen, yaitu Port Management System dan Capacity Building and Training. Dalam komponen 1, ICCTF akan melakukan kajian baseline emisi GRK, rehabilitasi dan pelestarian ekosistem pesisir (mangrove), dan pilot project ekowisata mangrove. Sedangkan komponen 2, akan dilakukan pelatihan-pelatihan yang mendukung kegiatan komponen 1. Setelah melalui rangkaian diskusi pada Q1 2021, DUK dan DIPK untuk project ini telah difinalisasi. Total pendanaan untuk 2 (dua) komponen yang akan dikelola ICCTF tersebut yang sebelumnya sebesar USD 648.341, telah direvisi menjadi USD 500.000.



Tabel 2.a.2 Project Digest Kerjasama Bappenas, KKP dan AFD tentang *Eco Fishing Port*

Informasi Project	Keterangan
Judul Kegiatan	<i>Technical Assistance to Outer Ring Fishing Ports Development (Eco Fishing Port)</i>
Judul Program	<i>Improvement of Fisheries Facilities Program</i>
Bentuk Kegiatan	<i>Technical Assistance</i>
Instansi Pengusul	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
Instansi Pelaksana	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap - KKP dan Kedeputan Kemaritiman dan Sumber Daya Alam – Kementerian PPN/Bappenas
Durasi Pelaksanaan	36 Bulan (2022 – 2024)
Lokasi	Sumatera Utara (PPS Belawan), Sulawesi Utara (PPS Bitung), Sulawesi Tenggara (PPS Kendari) dan Babel (PPN Sungai Liat)
Mitra Pembangunan/Donor	Agence Française de Développement (AFD)
Pendanaan	USD 2.155.000

Selain program tersebut, Bappenas melalui ICCTF telah menyampaikan rencana kerjasama lainnya kepada AFD berupa Concept Note Proposal terkait program Blue Carbon yang berjudul “*Management and Utilization of Mangrove Ecosystems to Support National Achievement of Sustainable Marine Development*” pada tanggal 16 Oktober 2020. Proposal ini merupakan tindak lanjut dari ketertarikan AFD untuk mendukung program dibidang Blue Carbon khususnya mangrove.

Hingga akhir Q1 2021, ICCTF masih menunggu hasil diskusi internal dan eksternal yang dilaksanakan oleh AFD terkait rencana dukungan bagi program mangrove tersebut. Program ini bertujuan untuk mengintegrasikan aspek kebijakan, keilmuan, peningkatan ekosistem mangrove dan mata pencaharian serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024 dan membantu pencapaian target National Determined Contribution (NDC) untuk penurunan emisi Gas Rumah Kaca.

Hingga akhir Q1 2021, ICCTF masih menunggu hasil diskusi internal dan eksternal yang dilaksanakan oleh AFD terkait rencana dukungan bagi program mangrove tersebut. Program ini bertujuan untuk mengintegrasikan aspek kebijakan, keilmuan, peningkatan ekosistem mangrove dan mata pencaharian serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024 dan membantu pencapaian target *National Determined Contribution* (NDC) untuk penurunan emisi Gas Rumah Kaca.

Rencananya program ini akan dilaksanakan di 3 (tiga) lokasi, yaitu Lampung (Lampung Timur), Sulawesi Utara (Bitung), dan Papua Barat (Teluk Bintuni) pada tahun 2022 - 2023 dengan total pendanaan hibah sebesar USD 1,8 juta. Terdapat 3 (tiga) kegiatan utama untuk program ini yaitu:

1) Mengarusutamakan Blue Carbon ke dalam kebijakan nasional dan subnasional melalui penerapan *Indonesia Blue Carbon Strategic Framework* (IBCSF)

2) Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan nasional dan subnasional dalam pengukuran sekuestrasi Blue Carbon dan memperkuat baseline Blue Carbon untuk mendukung inventarisasi data dan MRV emisi GRK.

3) Pemanfaatan ekosistem mangrove secara berkelanjutan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.a.3 Project Digest Kerjasama Bappenas, KKP dan AFD tentang Mangrove Ecosystems

<i>Title</i>	Management and Utilization of Mangrove Ecosystems to Support National Achievement of Sustainable Marine Development
<i>Project Objective</i>	To integrate policy, scientific, improvement of mangrove ecosystem and livelihood aspects and to the Mid-term National Development Plan 2020 – 2024 and to assist the achievement of National Determined Contribution for Green House Gas reduction.
<i>Project Duration</i>	2 (two) years, 2022 – 2023
<i>Target Location</i>	Lampung (East Lampung), North Sulawesi (Bitung), West Papua (Bintuni Bay)
<i>Proposed Budget</i>	Grant - EUR 1.800.000
<i>Executing Agency</i>	Deputy Minister for Maritime and Natural Resources, Ministry of National Development Planning/Bappenas
<i>Implementing Agency</i>	Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)
<i>Development Partner</i>	Agence Française de Développement (AFD)

2.3 Inisiasi Kerjasama dengan World Bank

Melanjutkan inisiasi program *Ocean for Prosperity – Infrastructure in Coral Reef Areas/Lautan Sejahtera - Infrastruktur Kawasan Terumbu Karang (INSAN TERANG LAUTRA)* yang rencananya akan mendapatkan dukungan pendanaan dari World Bank sejak awal Oktober 2020, usulan tersebut telah masuk ke dalam list Blue Book 2020-2024. Program ini telah dilakukan restrukturisasi beberapa kali oleh Kementerian PPN/Bappenas melalui ICCTF bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan. Revisi pertama dengan difokuskan pada infrastruktur pengelolaan ekosistem terumbu karang dan Kawasan konservasi, infrastruktur perikanan, dan infrastruktur wisata bahari sesuai dengan arahan Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas. Total dukungan pendanaan yang diajukan sebesar USD 85 Juta (USD 75 juta Pinjaman dan USD 10 juta hibah).

Revisi kedua terhadap dokumen DUK & DIPK serta Blue Book untuk program INSAN TERANG LAUTRA telah dilakukan pada Desember 2020. Total pendanaan program ini menjadi USD 450 Juta (USD 400 Juta pinjaman dan USD 50 Juta hibah). Hal ini sesuai dengan tindak lanjut atas inisiatif Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang mencetuskan inovasi untuk meningkatkan program rehabilitasi mangrove di Indonesia hingga mencapai 600.000 Ha. Inisiatif yang baik ini disambut oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan serta World Bank untuk mengembangkan usulan program tersebut. Atas diskusi bersama para pihak termasuk Kementerian PPN/Bappenas disepakati bahwa program rehabilitasi mangrove ini akan menjadi komponen tambahan dan merestrukturisasi kembali prososal INSAN TERANG LAUTRA. Namun, untuk Kementerian PPN/Bappenas melalui ICCTF direncanakan tetap akan mengelola kegiatan yang berasal dari pendanaan hibahnya khusus untuk kegiatan Blue Financing.

Revisi ketiga dilakukan pada Maret 2021. Perubahan prososal INSAN TERANG LAUTRA terdapat pada pemisahan komponen mangrove yang dikelola oleh KKP bersama Kementerian PPN/Bappenas dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Total pendanaan proposal INSAN TERANG LAUTRA yang dikelola oleh KKP dan Kementerian PPN/Bappenas menjadi USD 230 Juta (Pinjaman USD 200 juta dan Hibah USD 30 juta), sedangkan USD 220 Juta oleh KLHK dan BRGM sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel 2.a.4 dibawah ini.

Tabel 2.a.4 Project Digest Kerjasama Bappenas, KKP dan World Bank tentang INSAN TERANG LAUTRA

Judul	<i>Ocean for Prosperity - Infrastructures in Coral Reef and Mangrove Areas</i>
Lokasi	34 Provinsi 3 WPPNRI percontohan (714, 715, dan 716), KKPN Laut Sawu KKPD
Komponen/ ruang lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komponen 1: Infrastruktur Pengelolaan Terumbu Karang dan Kawasan Konservasi 2. Komponen 2: infrastruktur pengelolaan mangrove dan jasa ekosistemnya 3. Komponen 3: Pengelolaan Proyek, Pengembangan Kapasitas dan Pendanaan Berkelanjutan
Nilai	Pinjaman: USD 200.000.000 Hibah: USD 30.000.000 <ul style="list-style-type: none"> • Komponen 1: Pinjaman USD 60 juta, hibah USD 5 juta • Komponen 2: USD 100 juta, hibah USD 15 juta • Komponen 3: Pinjaman USD 40 juta, hibah USD 10 juta
Jangka waktu	5 tahun (2021-2026)

Selain itu, sebagai tindak lanjut untuk memasukan proposal INSAN TERANG LAUTRA kedalam Green Book 2021 - 2024 maka dilakukan penyusunan dokumen Readiness Criteria selama bulan Februari - Maret 2021.

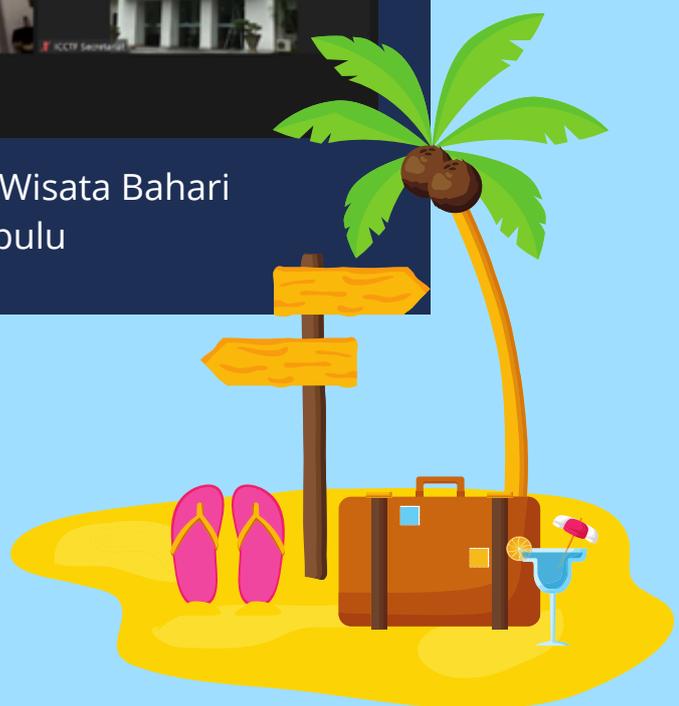
Dokumen Readiness Criteria tersebut telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Deputi Bidang Pendanaan Kementerian PPN/Bappenas pada tanggal 4 Maret 2021 untuk ditelaah dan diproses lebih lanjut kedalam *Green Book 2021 - 2024*.

Selanjutnya, untuk mendetailkan lokasi project dan kelembagaan proposal INSAN TERANG LAUTRA selama bulan Maret 2021 juga dilakukan rangkaian pertemuan seluruh PIU INSAN TERANG LAUTRA yang berasal dari KKP dan Bappenas. Proses selanjutnya dari proposal ini adalah menunggu hasil telaah dan surat penetapan Green Book 2021 - 2024 dari Kementerian PPN/Bappenas untuk kemudian proses pendanaan oleh World Bank.

2.4. Partisipasi dalam Program Strategis

2.4.1. Rapat Perencanaan Pengembangan Wisata Bahari

Pada tanggal 22 Januari 2021 telah dilaksanakan diskusi lanjutan mengenai Perencanaan Pengembangan Wisata Bahari melalui Zoom. Kegiatan dihadiri oleh Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas, Raja, Tonny Wagey, Sudaryanto, dan Gabrella. Diskusi ini membahas branding Wisata Bahari melalui media yang saat ini sedang banyak digunakan, yaitu podcast agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat terlebih generasi milenial. Raja akan menyiapkan naskah sementara ICCTF akan mendukung melalui pengambilan gambar dan suara.

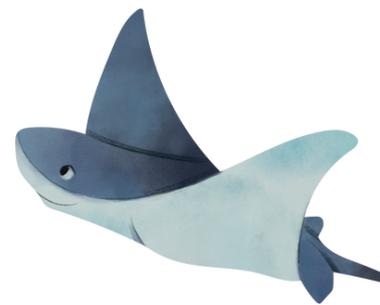


2.4.2. IEESD Webinar "*Feasibility of Green Recovery in Indonesia: The Role of Fossil Fuel Subsidy Reform*"

Pada tanggal 18 Februari 2021 perwakilan ICCTF menghadiri undangan IEESD Webinar "Feasibility of Green Recovery in Indonesia: The Role of Fossil Fuel Subsidy Reform". Acara ini merupakan bagian pertama dari tiga seri webinar International Energy, Environmental, and Society Dialogue (IEESD). IEESD adalah dialog tingkat tinggi di antara pembuat kebijakan dan pakar internasional untuk memberikan wawasan baru dan contoh internasional dari kebijakan yang mendukung pemulihan hijau, dengan tujuan mencapai pemahaman yang komprehensif tentang tantangan dan peluang untuk proses pembuatan kebijakan nasional dan internasional dan selanjutnya pengembangan kebijakan di Indonesia. Webinar ini diselenggarakan oleh IISD dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).



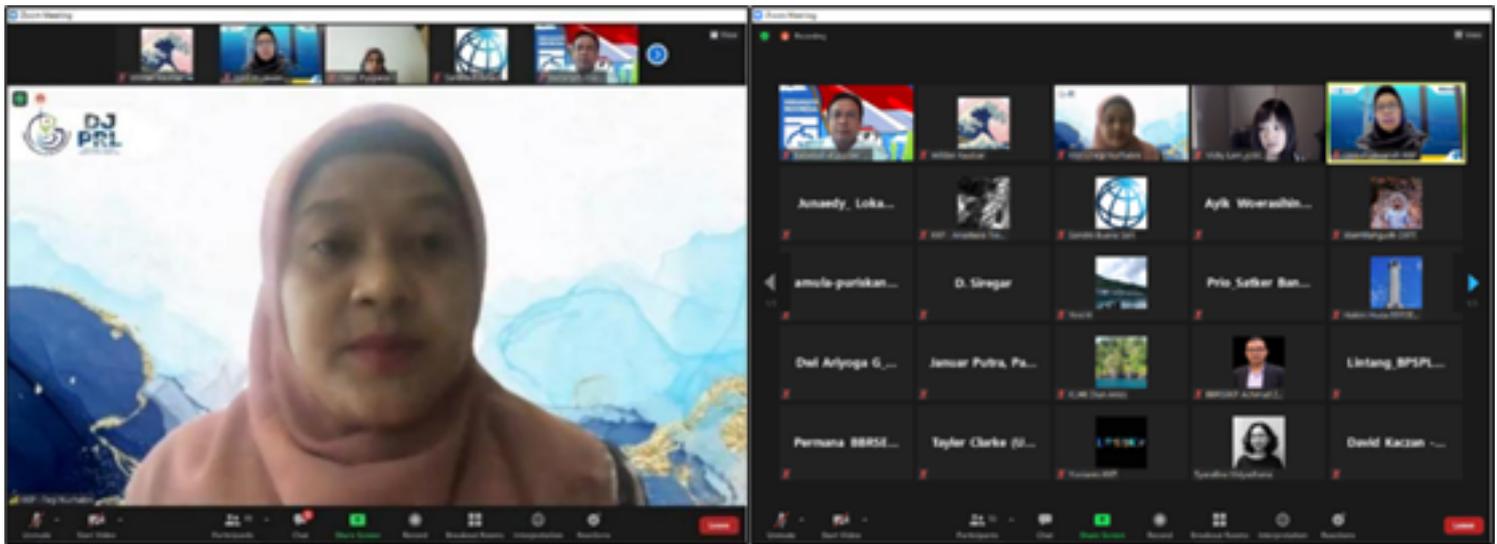
Gambar 2.a.4 Partisipasi dalam pertemuan IEESD



Sebagaimana diketahui bersama, pandemi COVID-19 telah memaksa pemerintah di seluruh dunia untuk menyesuaikan rencana pembangunan dan upaya reformasi energi mereka. Indonesia diharapkan dapat menumbuhkan ekonominya sebesar 5% pada tahun 2021, dan pemerintah terus memulihkan ekonominya dengan membelanjakan berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Webinar ini membahas bagaimana sektor energi dapat mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia dan menciptakan ekonomi yang lebih tangguh. Beberapa poin catatan dari webinar ini, antara lain adalah peran reformasi subsidi bahan bakar fosil dalam pemulihan ekonomi, hambatan reformasi subsidi bahan bakar fosil, dampak reformasi, dan bagaimana membuat reformasi subsidi bahan bakar menjadi lebih inklusif.

2.4.3 Undangan Workshop Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Sektor Kelautan dan Perikanan

Pada tanggal 9 Maret 2021, ICCTF menghadiri Undangan Workshop Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Sektor Kelautan dan Perikanan secara online oleh KKP. Workshop ini bertujuan untuk menghimpun masukan terkait dengan penyusunan kebijakan adaptasi perubahan iklim sektor kelautan dan perikanan. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara KKP dengan University of British Columbia – Canada, World Bank dan Lucille Packard Foundation.



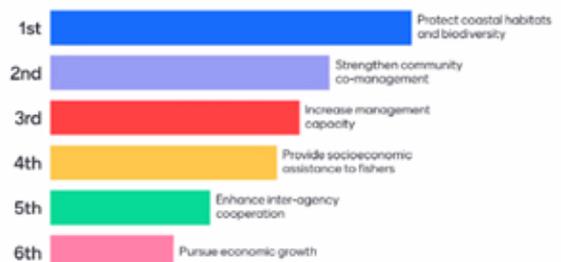
Gambar 2.a.5 Partisipasi ICCTF dalam Workshop Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Sektor Kelautan dan Perikanan

Pada workshop ini peserta dibagi kedalam tiga breakout room untuk berdiskusi dengan tema yang berbeda yaitu:

- 1) kelautan dan pesisir;
- 2) perikanan;
- 3) sosial ekonomi.

Pada akhir kegiatan seluruh peserta kembali ke ruang utama dan mengisi survey terkait usulan prioritas adaptasi untuk ketahanan iklim. Hasil survey sekaligus kesimpulan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Which is your preferred adaptation to build climate resilience?



Gambar 2.a.6 Hasil survei usulan prioritas adaptasi untuk ketahanan iklim

3. Komunikasi, Outreach dan Kemitraan

Berbagai kegiatan komunikasi dan publikasi yang terkait dengan penanggulangan perubahan iklim bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai dampak perubahan iklim, sekaligus mensosialisasikan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, khususnya Bappenas pada satker ICCTF dalam melaksanakan komitmen penurunan emisi Gas Rumah Kaca. Pada tahun 2020 hingga di tahun 2021 ini, kegiatan komunikasi dan publikasi ICCTF juga diarahkan untuk mendukung implementasi Bappenas dalam konteks RPJMN serta monitoring ekosistem pesisir prioritas dan Rehabilitasi Terumbu Karang.

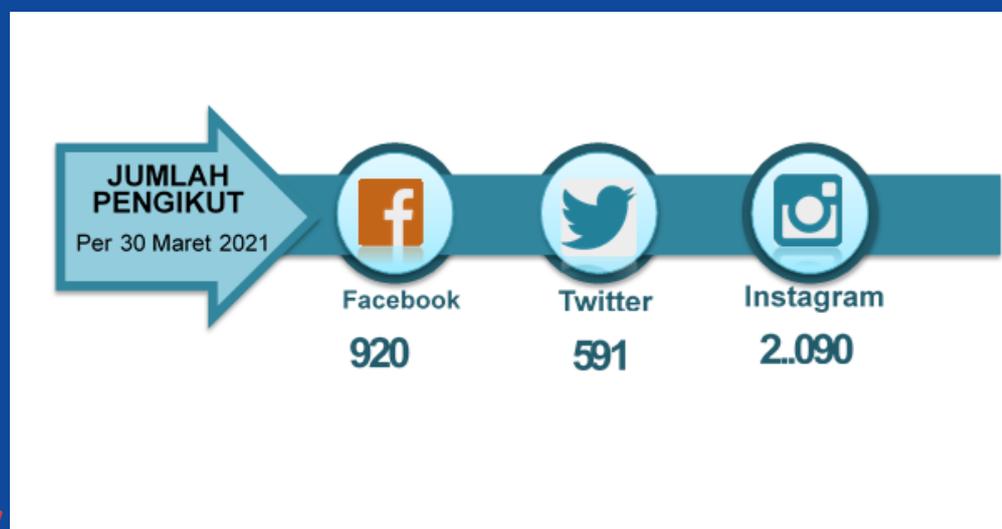
Kegiatan komunikasi ICCTF terbagi atas dua strategi yaitu komunikasi internal dan eksternal. Melalui kegiatan-kegiatan komunikasi ini, eksistensi ICCTF sebagai satu-satunya lembaga perwalian dana perubahan iklim yang dimandatkan oleh pemerintah di Indonesia diharapkan dapat lebih dikenal dan diakui, baik oleh pemangku kepentingan di dalam maupun luar negeri. Komunikasi internal kepada seluruh staf ICCTF di semua level untuk meningkatkan manajemen pengetahuan untuk staf tentang visi-misi ICCTF, menginternalisasi nilai-nilai strategis organisasi, dan membangun soliditas staf agar terbangun suatu budaya kerja positif di ICCTF.

Sedangkan untuk kegiatan komunikasi eksternal, ICCTF menekankan pada pengenalan visi-misi organisasi, peranan strategis organisasi, serta eksistensi dan fungsi dari pengembangan program-program ICCTF. Selain itu juga menyebarkan capaian serta pembelajaran program-program ICCTF yang layak untuk disebarluaskan dan direplikasi di daerah lainnya yang memiliki karakteristik dan permasalahan serupa. Upaya pengenalan dan penjangkauan publik ICCTF dilakukan secara intens dengan pola yang beragam dan target yang variatif. Pola komunikasi yang diterapkan secara umum tidak hanya dalam bentuk sosialisasi dan ekspose program-program ICCTF, tetapi juga dalam bentuk kunjungan dan liputan media ke lokasi program, focus group discussion (FGD), pameran dan seminar, optimalisasi sosial media dan website ICCTF, media social, serta peningkatan relasi dengan media melalui kegiatan media gathering. Komunikasi lebih fokus pada komunikasi eksternal melalui penyelenggaraan kegiatan ekspose, pameran, seminar publik, Media serta ke ikut sertaan dalam kegiatan-kegiatan bertaraf internasional.

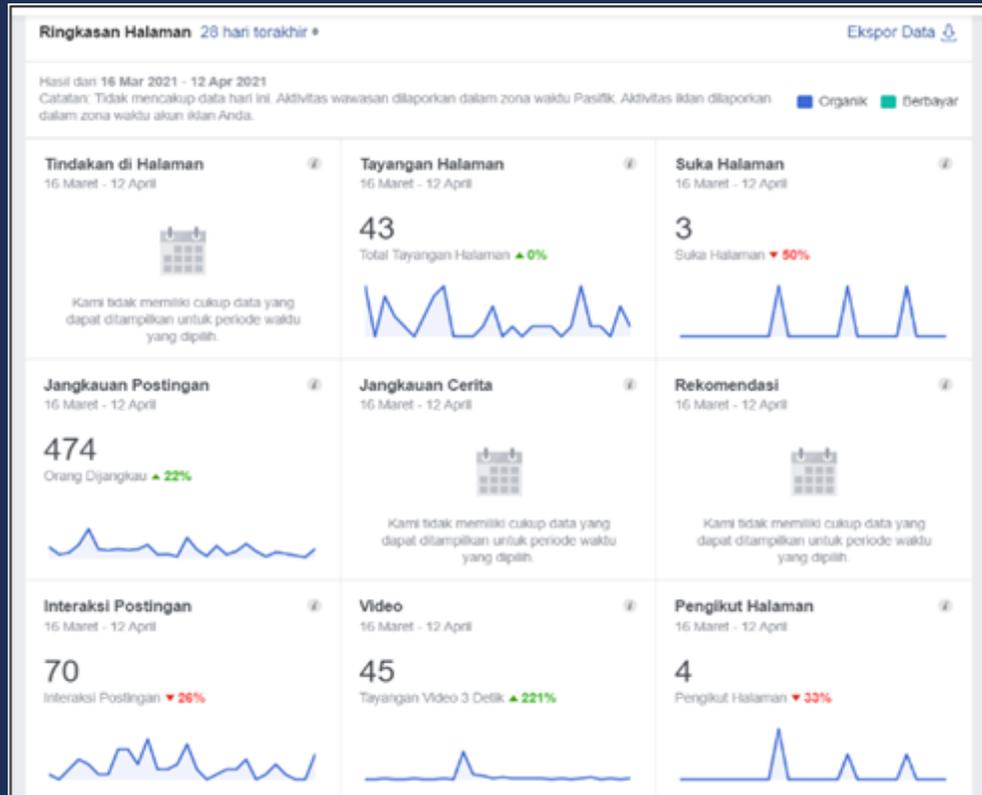
3.1. Media Sosial

Pada triwulan pertama 2021 ini ICCTF melakukan strategi pendekatan komunikasi digital untuk menjangkau khalayak yang luas dengan mengadakan kuis di platform instagram. Komunikasi digital dinilai lebih interaktif dan real time, melalui pengelolaan media sosial ICCTF yang terdiri atas Facebook (<https://www.facebook.com/IndonesiaClimateChangeTrustFund>) ; Twitter (@ICCTF_ID) ; Instagram (@icctfofficial); Youtube (ICCTF Official) dan website ICCTF (<https://www.icctf.or.id/>).

ICCTF berupaya untuk selalu mengoptimalkan kanal informasi yang tersedia termasuk media sosial dengan memperbaharui penyebaran konten informasi dan foto- foto kegiatan terkini yang dilakukan oleh ICCTF dan para mitra pelaksana di daerah. Portofolio pengelolaan media sosial ICCTF pada periode triwulan keempat terangkum pada Gambar di bawah. Adapun laporan traffic dari media sosial yang dikelola oleh ICCTF terangkum dalam infografis berikut.



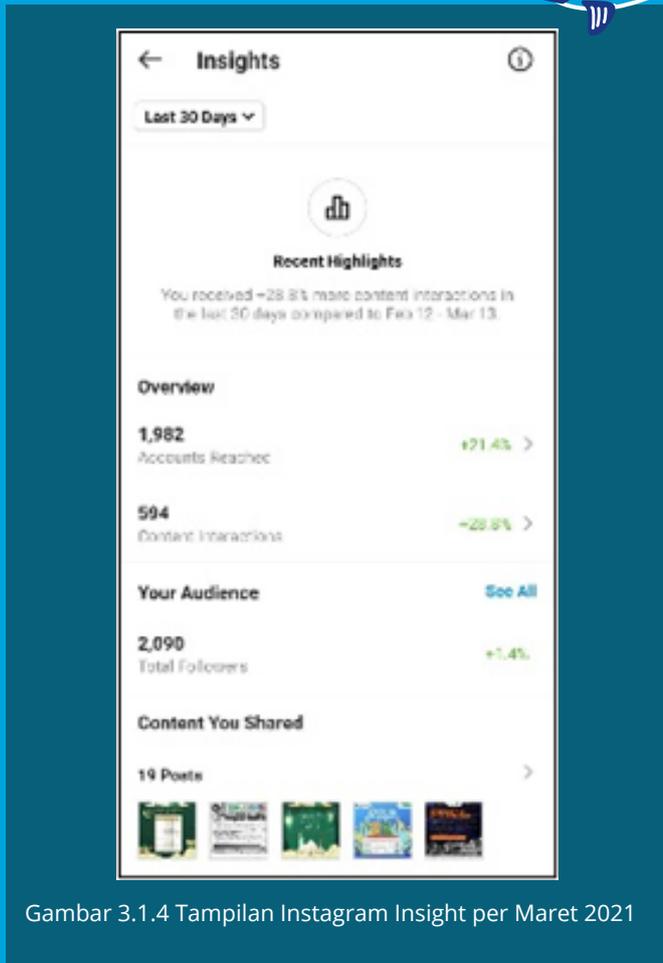
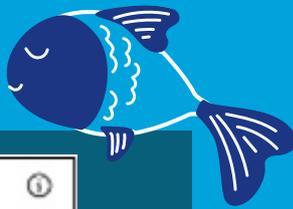
Gambar 3.1.1 Jumlah Pengikut pada Media Sosial ICCTF



Gambar 3.1.2 Tampilan Insights Analisa Facebook per Maret 2021



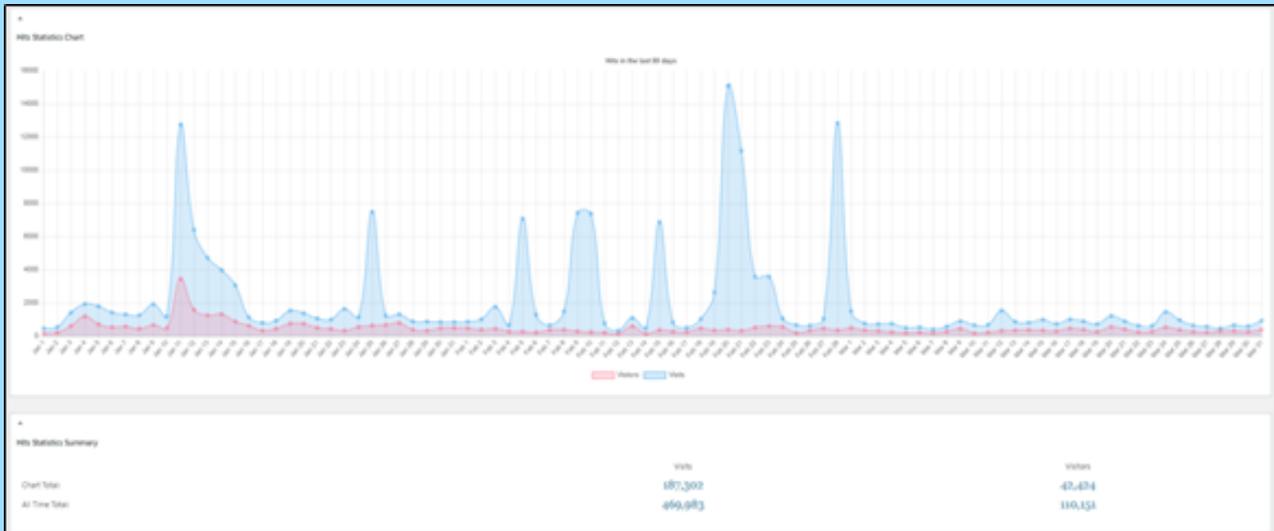
Gambar 3.1.3 Tampilan Twitter Analytics per Maret 2021



Gambar 3.1.4 Tampilan Instagram Insight per Maret 2021

Sementara itu untuk pengelolaan website, traffic merekam sekitar 187,302 kali jumlah kunjungan ke halaman website ICCTF dengan 110,151 total pengunjung hingga periode Maret 2021. Pada triwulan pertama 2021 ini, tim komunikasi juga memperbarui tampilan website ICCTF dengan pembaruan warna halaman dan tema. Beberapa laman dalam website ICCTF pembaruan foto kegiatan, homepage ICCTF, ICCTF News, Tender & Vacancies, Previous Event, Pop-up Information Vacancies, ICCTF Video Gallery, dan tentunya ICCTF News. Beberapa judul artikel yang tayang di ICCTF News periode Januari-Maret 2021, di antaranya:

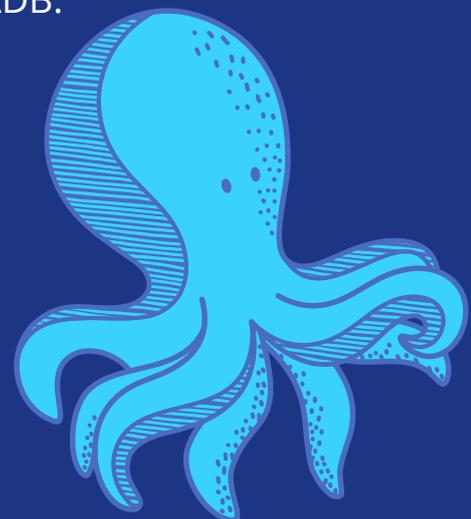
1. Kesehatan Laut: Sampah Medis Menuju Teluk Jakarta Meningkat.
2. Potensi Perbaikan Ekosistem melalui Penanaman Pohon Mangrove.
3. KKP: Sebanyak 27 provinsi telah tetapkan Perda Zonasi Pesisir.
4. Kunjungan Lapangan ke Provinsi Sulawesi Utara.
5. Pemerintah Targetkan, Sampah Plastik Di Laut Indonesia Berkurang 70%.
6. Baronang si Pembawa Keberuntungan.
7. Kualitas Udara dan Air Membaik.
8. Perempuan Pelestari Pesisir.
9. Pembangunan Menara Pengawas di Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Sabu Raijua.
10. Seminar Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan: Studi Bioekonomi Udang.
11. Siaran Pers: Pengelolaan Sumber Daya Pesisir untuk Penguatan Ekonomi Berkelanjutan.
12. Inovasi Pembangunan Kajian Bioekonomi.
13. Kementerian PPN/Bappenas Lakukan Kajian Bioekonomi WPP Berbasis Jenis.
14. Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Studi Bioekonomi Udang.



Gambar 3.1.5 Tampilan Website Statistic per Maret 2021

Untuk komunikasi secara eksternal ICCTF juga melakukan penayangan lowongan pekerjaan di website serta situs DevJobs Indo. Beberapa iklan lowongan pekerja yang tayang di website ICCTF & situs DevJobs Indo periode Januari - Maret 2021, di antaranya:

1. Creative Officer.
2. Finance and Administration Officer COREMAP-CTI ADB.
3. Procurement Specialist COREMAP-CTI ADB.
4. Monitoring & Evaluation Specialist COREMAP-CTI ADB.
5. Site Coordinator Nusa Penida COREMAP-CTI ADB.
6. Site Coordinator Gili Matra COREMAP-CTI ADB.
7. Site Coordinator Gili Balu COREMAP-CTI ADB.
8. Tenaga pengemudi



3.2 Produksi Media

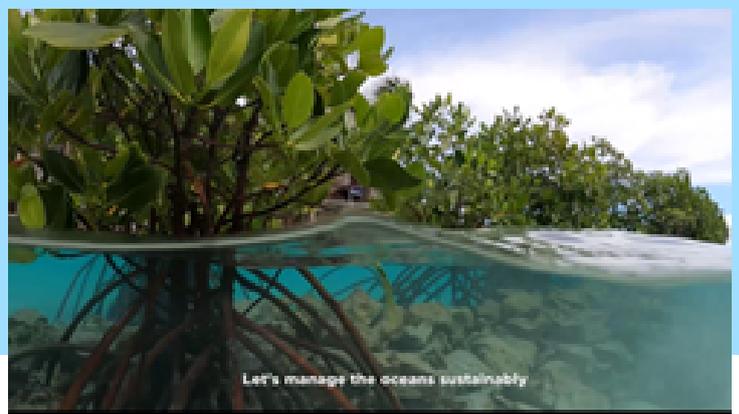
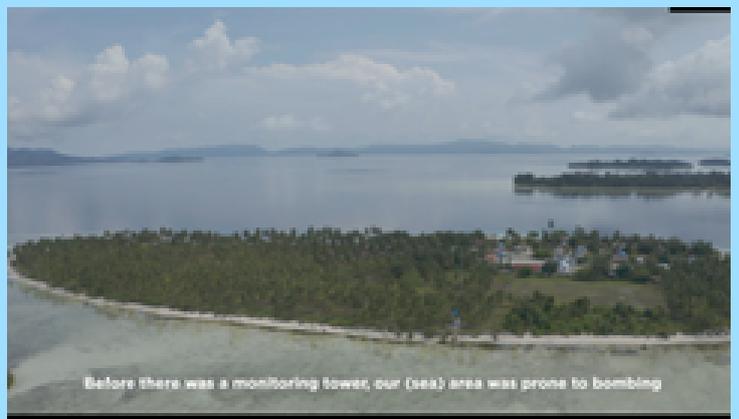
Pada Q1 ini Indonesia Climate Change Trust Fund melakukan komunikasi massa secara digital. ICCTF dan mitra pelaksana COREMAP-CTI World Bank mendukung pembuatan video bertajuk Laut untuk Kesejahteraan yang merupakan kumpulan kisah-kisah pengelolaan laut secara berkelanjutan yang didanai oleh World Bank. Pada 4 Maret 2021 dilakukan meeting melalui zoom yang membahas teknis pembuatan video dan story line yang diikuti ICCTF, World Bank, National Geographic Indonesia, Edelman, dan mitra pelaksana, meeting dilakukan meeting melalui zoom yang membahas teknis pembuatan video dan *story line*. Kemudian proses pengambilan gambar dilakukan di wilayah kerja Mitra COREMAP-CTI di Papua Barat pada minggu kedua bulan Maret.

Video ini ditampilkan saat peluncuran laporan World Bank yang berjudul "Laut untuk Kesejahteraan: Reformasi untuk Ekonomi Biru di Indonesia". Laporan tersebut telah mendapatkan masukan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan - akan secara resmi diluncurkan pada 25 Maret 2021.



Dalam pembuatan video bertajuk Laut untuk Kesejahteraan, Bank Dunia bekerja sama dengan *National Geographic* Indonesia dalam pembuatannya. Video berdurasi 10 menit tersebut ini menyajikan pentingnya peran laut dan ekosistemnya bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat kisah-kisah positif di Raja Ampat, Papua Barat, mengenai pengelolaan laut dan ekosistemnya secara berkelanjutan untuk pariwisata, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Tabel 3.2.1 Cuplikan video bertajuk Laut untuk Kesejahteraan





Tabel 3.2.2
Tampilan Newsletter ICCTF Vol. 28

Produksi media secara digital untuk mendukung kegiatan sekretariat termasuk di antaranya Coral Reef Rehabilitation and Management Program Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) yaitu dengan memproduksi Newsletter ICCTF Vol 28 yang kemudian dipublish di website dan social media ICCTF.



3.3 Media Monitoring

3.3.1 Seminar Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan : Studi Bioekonomi Udang, Siaran Pers:

Pada Q1 ini Indonesia Climate Change Trust Fund melakukan Media Monitoring terhadap kegiatan yang melibatkan media massa di antaranya:

JAKARTA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas sebagai enabler inovasi pembangunan melakukan sebuah kajian bioekonomi sebagai kegiatan percontohan terkait Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) berbasis jenis. “Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dengan penerapan dari *science-based policy* dalam penyusunan kebijakan dengan menggunakan *community based* sebagai dasar implementasi.”, ujar Arifin Rudiyanto, Deputy Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas dalam Seminar Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan: Studi Bioekonomi Udang di Laut Arafura, yang dilangsungkan di Jakarta, Selasa (24/03/2021).

Data dan informasi mendukung pengelolaan perikanan melalui *science-based policy* dan *community-based implementation*. Kebijakan berbasis sains ini akan menjembatani perencanaan pembangunan yang mendukung peningkatan kesejahteraan, pelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pendapatan negara dengan mendorong perekonomian nasional.

Implementasi pengelolaan WPP 718, Indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) memastikan akurasi pendataan stok sumber daya ikan dan pemanfaatan WPP dengan penguatan pendataan stok sumber daya ikan, penerapan tracking kapal laut, serta pelaksanaan kajian bioekonomi perikanan yang potensial seperti udang. Laut Arafura yang termasuk ke dalam WPP 718 dikenal dengan kelimpahan udang dengan produksi mencapai 283,4 ribu ton atau sekitar 11% dari produksi nasional (KKP, 2019). Namun pengelolaan sumber daya udang di WPP ini menghadapi banyak tantangan beberapa tahun ke belakang karena adanya illegal fishing, overcapacity dan belum diketahui tingkat optimal alokasi kapal dan manfaat sumber daya yang seharusnya diperoleh pemerintah.

Arah kebijakan kemaritiman, kelautan, dan perikanan dalam RPJMN di antaranya menjadikan WPP sebagai basis spasial dalam pembangunan perikanan berkelanjutan (sustainable fisheries), serta pengelolaan dan penataan ruang laut dan rencana zonasi, mengelola ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan secara berkelanjutan, meningkatkan produksi, produktivitas, standarisasi, jaminan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan, meningkatkan fasilitasi usaha, pembiayaan, kesejahteraan dan pemberdayaan nelayan, dan perlindungan usaha skala kecil, serta meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM, inovasi teknologi dan riset, serta penguatan database.

Beberapa catatan penting untuk mendukung pengelolaan perikanan berkelanjutan di antaranya keberhasilan pengelolaan perikanan berkelanjutan sangat tergantung pada ketersediaan data dan informasi, kebijakan harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah (implementasi itu tidak bersifat one fit for all), implementasi dalam pengelolaan WPP dilakukan dengan melibatkan semua stakeholder mulai dari Perguruan Tinggi sampai dengan pelaku usaha dan masyarakat (berbasis komunitas - *community based*), perlu adanya lembaga yang mengelola data dan informasi yang bersifat permanen dengan memperhatikan prinsip independensi. Tak hanya itu, dukungan political will untuk memanfaatkan data tersebut dalam pengambilan kebijakan kedepan, serta adanya data center untuk pengelolaan data yang dipublikasikan dan dapat digunakan oleh semua pemangku kepentingan (*sharing data*).

“Harapannya pengelolaan WPP berbasis sains dengan mengkombinasikan aspek keberlanjutan ekosistem dan pertumbuhan ekonomi ini akan mendukung perikanan berkelanjutan di Indonesia. Kajian bioekonomi yang telah dilakukan ini dapat menentukan pengaturan input dan output untuk mendukung keberlanjutan ekosistem dan peningkatan ekonomi dan penentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak” jelas Sri Yanti, Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas.

Kajian bioekonomi ini masih terus akan disempurnakan seiring dengan ketersediaan data yang lebih komprehensif. Namun demikian studi ini dapat menjadi acuan awal untuk pengelolaan perikanan udang di Arafura yang berbasis kaidah-kaidah ilmiah yang transparan dan akuntabel. “Hasil kajian bioekonomi ini digunakan untuk membuat kebijakan yang berkelanjutan dengan memperhitungkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan, kajian bioekonomi udang ini diharapkan dapat mendukung inovasi pembangunan di sektor kelautan dan perikanan di Indonesia,” tutup Sri Yanti.

Tabel 3.1.1 Daftar Unggahan Publikasi Media Pada Kegiatan Seminar Bioekonomi

No	Media Massa	Judul	Link Berita
1	<i>rri.co.id</i>	Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Studi Bioekonomi Udang	https://m.rri.co.id/ekonomi/1005114/pengelolaan-perikanan-berkelanjutan-studi-bioekonomi-udang?utm_source=terbaru_widget&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign
2	<i>cakrawalanews.co.id</i>	Kementerian PPN/Bappenas Lakukan Kajian Bioekonomi WPP Berbasis Jenis	http://www.cakrawalanews.co.id/artikel/4928/Kementerian-PPN-Bappenas-Lakukan-Kajian-Bioekonomi-WPP-Berbasis-Jenis/
3	<i>sinarharapan.id</i>	Inovasi Pembangunan Kajian Bioekonomi	https://sinarharapan.id/inovasi-pembangunan-kajian-bioekonomi/
4	<i>fin.co.id</i>	Bappenas Kaji Bioekonomi WPP	https://fin.co.id/2021/03/24/bappenas-kaji-bioekonomi-wpp/
5	<i>poskota.co</i>	Bappenas Lakukan Kajian Pengelolaan Bioekonomi Perikanan	https://poskota.co/nasional/bappenas-lakukan-kajian-pengelolaan-bioekonomi-perikanan/
6	<i>tagar.id</i>	Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan, Bappenas Lakukan Studi Bioekonomi Udang	https://www.tagar.id/pengelolaan-perikanan-berkelanjutan-bappenas-lakukan-studi-bioekonomi-udang/?source=twitter
7	<i>topbusiness.id</i>	Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Gunakan Community Based	https://www.topbusiness.id/48588/pengelolaan-perikanan-berkelanjutan-gunakan-bioekonomi-udang.html
8	<i>suarakarya.id</i>	Kemen PPN/Bappenas Kaji Bioekonomi Udang Terkait Wilayah Pengelolaan Perikanan	https://m.suarakarya.id/detail/129894/Kemen-PPNBappenas-Kaji-Bioekonomi-Udang-Terkait-Wilayah-Pengelolaan-Perikanan
9	<i>gatra.com</i>	Masyarakat Dilibatkan dalam Pengelolaan Ikan, Ini Alasannya	https://www.gatra.com/detail/news/507301/ekonomi/masyarakat-dilibatkan-dalam-pengelolaan-ikan-ini-alasannya
10	<i>balipuspanews.com</i>	Kementerian PPN/Bappenas Lakukan Kajian Bioekonomi WPP Berbasis Jenis	https://www.balipuspanews.com/kementerian-ppn-bappenas-lakukan-kajian-bioekonomi-wpp-berbasis-jenis.html

3.3.2 Kick – Off COREMAP–CTI ADB Bali:

BALI – Indonesia merupakan negara kepulauan dengan sumber daya pesisir dan laut yang sangat kaya dan dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Indonesia memiliki 596 jenis terumbu karang, kita memiliki 14 persen dari luas terumbu karang dunia, dengan 39 persen jenis ikan karang dunia. Pengelolaan sumber daya pesisir merupakan strategi dan program jangka panjang untuk menguatkan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.

“Kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir Indonesia merupakan Prioritas Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024) terutama untuk mendukung ketahanan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Provinsi Bali & Nusa Tenggara Barat memiliki terumbu karang dengan keanekaragaman tinggi, sehingga kita perlu berkomitmen untuk menjaganya, Kegiatan Coral Reef Rehabilitation and Management Program – Coral Triangle Initiative (COREMAP–CTI) ini merupakan trigger atau stimulus pasca pandemi COVID-19 untuk menggerakkan kegiatan lain di bidang ekonomi.” ujar Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Himawan Hariyoga dalam kegiatan Kick Off COREMAP–CTI, di Nusa Dua, Bali, Selasa (30/03/2021),

Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai implementing agency kegiatan COREMAP–CTI atau dikenal dengan Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang – Prakarsa Segitiga Karang, program ini merupakan program untuk menjaga kelestarian terumbu karang Indonesia sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang mengandalkan laut dalam kehidupan mereka. Kick off COREMAP–CTI di Bali ini merupakan kolaborasi multi pihak untuk pengelolaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan terutama dengan dukungan pendanaan dari Asian Development Bank yang akan dilakukan oleh Indonesia Climate Change Trust Fund serta para mitra pelaksana.

Kegiatan Kick-off COREMAP-CTI ini juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Dirjen PRL) TB Haeru Rahayu, Kepala Bappeda Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, Pejabat Kementerian/Lembaga, mitra pembangunan, pemerintah daerah, serta NGO/CSO pelaksana program COREMAP-CTI di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat.

Himawan menjelaskan, bahwa intervensi yang dilakukan oleh program COREMAP-CTI adalah melalui berbagai kegiatan pengelolaan kawasan konservasi dan peningkatan usaha ekonomi masyarakat. Selain itu, dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, Bappenas terus menekankan bahwa tidak ada trade off antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Pelestarian sumber daya pesisir dalam hal ini terumbu karang dapat menjadi salah satu contoh nyata bagaimana upaya menjaga lingkungan dapat sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat dan nasional.

Dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan target rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2025 dalam pembangunan kelautan dan perikanan, Bappenas berperan sebagai enabler bagi para pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, daerah dan masyarakat melalui pendekatan convergence dimana Bappenas menjadi wadah dalam pembangunan partisipatif. Pelaksanaan COREMAP-CTI dengan dana hibah Asian Development Bank ini merupakan bentuk pilot project dimana Nusa Penida, Bali lokasi pilot project. Tak hanya itu Gili Matra dan Gili Balu, Nusa Tenggara Barat juga menjadi area pilot project pelestarian terumbu karang ini. Yang pada akhirnya, pilot project itu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat diadopsi oleh berbagai pihak terkait.

- **Substansi COREMAP CTI**

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Arifin Rudiyanto menuturkan, “COREMAP-CTI juga mendukung Sustainable Development Goals 14 (Life Below Water) yaitu konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudera dan maritim untuk mencapai 3 target utama SDG’s antara lain perlindungan ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan, mengkonservasi setidaknya 10% area pesisir laut dan meningkatkan keuntungan ekonomi yang berkelanjutan”.

Tujuan program pelestarian terumbu karang ini adalah untuk mencapai efektifitas pengelolaan 80% level biru. Bentuk intervensi COREMAP-CTI dengan pendanaan Asian Development Bank di Nusa Penida, Gili Matra, dan Gili Balu tersebut dilakukan dalam bentuk Penguatan Kelembagaan dan pengelolaan terumbu karang, pengembangan rencana pengelolaan sumber daya berbasis ekosistem dan peningkatan mata pencaharian berkelanjutan.

- **Latar Belakang Pendanaan**

Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian PPN/Bappenas Sri Yanti menerangkan bahwa pada tahun 2019 Bappenas melalui ICCTF telah dipercaya untuk mengelola proyek COREMAP-CTI dengan pendanaan hibah yang berasal dari Global Environment Facility (GEF), yang disalurkan melalui World Bank dan Asian Development Bank.

“Latar belakang pelaksanaan COREMAP-CTI dengan dana hibah dari ADB diantaranya adalah target untuk mencapai 10% Kawasan Konservasi Perairan (KKP) pada tahun 2030, meningkatkan efektifitas pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan di Lesser Sunda, khususnya Nusa Penida di Bali, Gili Matra dan Gili Balu di Nusa Tenggara Barat, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan,” jelas Sri Yanti.

Dukungan COREMAP-CTI Asian Development Bank sebesar US\$5,2 juta telah dimulai pada 4 Maret hingga 31 Desember 2022 ini bertujuan untuk mencapai 80% Kategori Biru di Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Nusa Penida, mencapai 80% Kategori Biru di Taman Wisata Perairan (TWP) Gili Matra, dan mencapai 100% Hijau Taman Pulau Kecil (TPK) Gili Balu.

Tabel 3.1.2 Daftar Unggahan Publikasi Media Pada Kegiatan Kick-off Meeting COREMAP-CTI ADB

No	Media Massa	Judul	Link
1	Baliilu.com	Kick Off COREMAP-CTI, Pengelolaan Sumber Daya Pesisir untuk Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	https://baliilu.com/kick-off-coremap-cti-pengelolaan-sumber-daya-pesisir-untuk-penguatan-ekonomi-berkelanjutan/
2	Redaksi9.com	Pengelolaan Sumber Daya Pesisir untuk Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	https://www.redaksi9.com/read/4234/Pengelolaan-Sumber-Daya-Pesisir-untuk-Penguatan-Ekonomi-Berkelanjutan.html
3	Kabar Hits Bali	Sumber Daya Pesisir Untuk Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	https://kabarbalihits.com/2021/03/30/sumber-daya-pesisir-untuk-penguatan-ekonomi-berkelanjutan/
4	Balinesia	Bappenas Harapkan Nusa Penida Jadi Contoh Pengelolaan Pemanfaatan Terumbu Karang	https://balinesia.id/read/bappenas-harapkan-nusa-penida-jadi-contoh-pengelolaan-pemanfaatan-terumbu-karang
5	Bali Puspa	Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Jadi Prioritas RPJMN	https://www.balipuspanews.com/pengelolaan-sumber-daya-pesisir-jadi-prioritas-rpjmn.html
6	RRI Bali	Ini Tiga Target Indonesia dalam Pengelolaan Terumbu Karang	https://m.rri.co.id/go/qS77zpK
7	Bali Post	Jaga Kelestarian, Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang Dimulai	https://www.balipost.com/news/2021/03/30/183649/Jaga-Kelestarian.Program-Rehabilitasi-dan...html
8	Pos Bali	Nusa Penida Jadi Pilot Project COREMAP-CTI	https://posbali.co.id/nusa-penida-jadi-pilot-projek-coremap-cti/
9	Kompas	Perairan Nusa Penida Masuk Lokasi Percontohan Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang	https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2021/03/30/perairan-nusa-penida-masuk-lokasi-percontohan-rehabilitasi-dan-pengelolaan-terumbu-karang/?utm_source=bebasakses_kompasid&utm_medium=whatsapp_shared&utm_content=sosmed&utm_campaign=sharinglink
10	Bali Portal	Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang Sebagai Upaya Menjaga Ekosistem Laut Bali	https://baliportalnews.com/2021/03/program-rehabilitasi-dan-pengelolaan-terumbu-karang-sebagai-upaya-menjaga-ekosistem-laut-bali

III. Audit, Keuangan dan Operasional

3.1 Laporan Audit Tahun 2021

Sebagai bentuk pertanggungjawaban yang menganut prinsip transparansi dan akuntabel, Laporan Keuangan ICCTF setiap tahunnya diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Negara. Pada tahun 2021 ini BPK sedang mengaudit Laporan Keuangan Satuan Kerja Majelis Wali Amanat ICCTF Tahun Anggaran 2020 dan opini masih belum difinalkan. Sedangkan audit untuk kegiatan Hibah Asian Development Bank (ADB) dan World Bank (WB) Tahun Anggaran 2020 juga sedang diaudit oleh BPK Audit Khusus di tahun 2021 ini.

3.2 Informasi Keuangan Periode Januari - Maret 2021

Sebagai satu-satunya Lembaga Dana Perwalian Perubahan Iklim Nasional di Indonesia, ICCTF selalu memegang prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam setiap kegiatan terkait keuangan sehingga, prinsip tata kelola organisasi dapat tercapai.

Bagian Keuangan ICCTF secara rutin mengadministrasikan, menyiapkan dan melaporkan semua kegiatan pelaksanaan secara tertib dan sesuai dengan kaidah tata kelola yang baik. Pada tahun 2021 ICCTF mengelola dana Rupiah Murni APBN sebesar 7,68M dan dana Hibah Luar Negeri (Hibah Terencana) sebesar 44,82M sehingga total dana yang dikelola ICCTF Tahun Anggaran 2021 adalah 52,50M. Capaian pada kuartal 1 tahun 2021 adalah sebesar 26,65M yaitu 50,76% dari total dana yang dikelola. Untuk rincian alokasi dana tersebut, bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2.1 Rincian Penyerapan Dana sampai dengan bulan Maret tahun 2021

Sumber Dana	Anggaran	Penyerapan	Sisa Anggaran
APBN - ICCTF	7.680.000.000	1.152.834.119 15%	6.527.165.881
Hibah – World Bank (Reksus)	25.650.000.000	24.331.143.936 95%	1.338.856.064
Hibah – Asian Development Bank (Reksus)	19.170.000.000	1.201.746.065 6%	17.921.653.935
TOTAL	52.500.000.000	26.665.724.120 51%	25.834.275.880

3.3 Operasional / Kesekretariatan

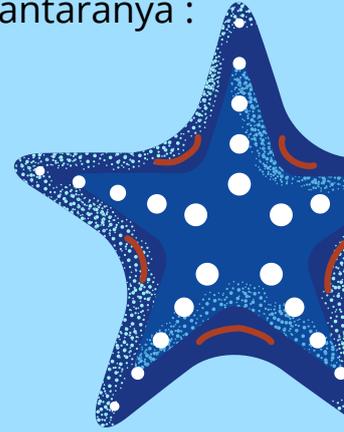
Pada periode triwulan pertama, Operasional ICCTF didukung oleh 23 personil professional yang terdiri atas 14 orang jasa konsultan dan 9 orang jasa lainnya. Distribusi gender terdiri atas 11 perempuan dan 12 laki-laki. Pembiayaan untuk personil bersumber dari anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Hibah World Bank dan Asian Development Bank (ADB) Satker ICCTF. Adapun susunan personil ICCTF pada kuartal 1 ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.1 Rincian Penyerapan Dana sampai dengan bulan Maret tahun 2021

No	Nama	Posisi	Pendanaan
1	Gabriel A. Wagey	Executive Director	Rupiah Murni (APBN)
2	Mega Gusti Rama	Finance and Operation Manager	Rupiah Murni (APBN)
3	Sudaryanto	Program Manager	Rupiah Murni (APBN)
4	Anggri Heravanthi	Accounting Specialist	Rupiah Murni (APBN)
5	SiwiHandinah	General Adm dan HR Coordinator	Rupiah Murni (APBN)
6	Gabrella Sabrina	Communication and Digital Off.	Rupiah Murni (APBN)
7	Muhammad Wildan Kautsar	Knowledge Management Officer	Rupiah Murni (APBN)
8	Joshua Arianto M	Program Officer	Rupiah Murni (APBN)
9	Affalia Maydi Hatika	Communication Assistant	Rupiah Murni (APBN)
10	Deta Kurnia Soundra	IT Officer	Rupiah Murni (APBN)
11	Eko Wahyudi	Finance and Administration Officer Coremap-CTI WB	Rupiah Murni (APBN)
12	Uli Natul Khasanah	Adminstration Officer	Rupiah Murni (APBN)
13	Agus Salim	Logistic and General Support	Rupiah Murni (APBN)
14	Sugihartono	Office Assistant	Rupiah Murni (APBN)
15	Muhamad Nuryanto	Pengemudi	Rupiah Murni (APBN)
16	Nur Jali	Procurement Officer	Rupiah Murni (APBN)
17	Andrian Firmansyah	Tenaga Operasional Perkantoran	Rupiah Murni (APBN)
18	Februanty Suyatiningsih	Monev Specialist COREMAP CTI WB	Hibah LN World Bank
19	Aris Arianto	Procurement Specialist COREMAP CTI WB	Hibah LN World Bank
20	Dwipayana	ESSF COREMAP CTI WB	Hibah LN World Bank
21	Irvan Ahmad Fikri	Program Officer COREMAP CTI WB	Hibah LN World Bank
22	Alya Prima Syanti	Financial Management Specialist Coremap CTI ADB	Hibah LN ADB
23	Leonas Chatim	Project Team Leader COREMAP-CTI ADB	Hibah LN ADB

Sampai dengan kuartal 1, masih ada 9 posisi yang belum terisi diantaranya :

1. Financial Manajemen Specialist World Bank
2. Creative Officer
3. Finance and Administration Officer COREMAP-CTI ADB
4. Procurement Specialist COREMAP-CTI ADB
5. Monitoring & Evaluation Specialist COREMAP-CTI ADB
6. Site Coordinator Nusa Penida COREMAP-CTI ADB
7. Site Coordinator Gili Matra COREMAP-CTI ADB
8. Site Coordinator Gili Balu COREMAP-CTI ADB
9. Pengemudi operasional



Pengumuman perekrutan dilakukan dengan cara penayangan lowongan pekerjaan di website ICCTF, media sosial ICCTF, situs seperti DevJobs Indo, CMS ADB (pendanaan ADB) dan website LPSE LKPP. Perekrutan staf dilakukan oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Satker ICCTF, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kementerian PPN/ Bappenas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan Committee pemilihan ICCTF.

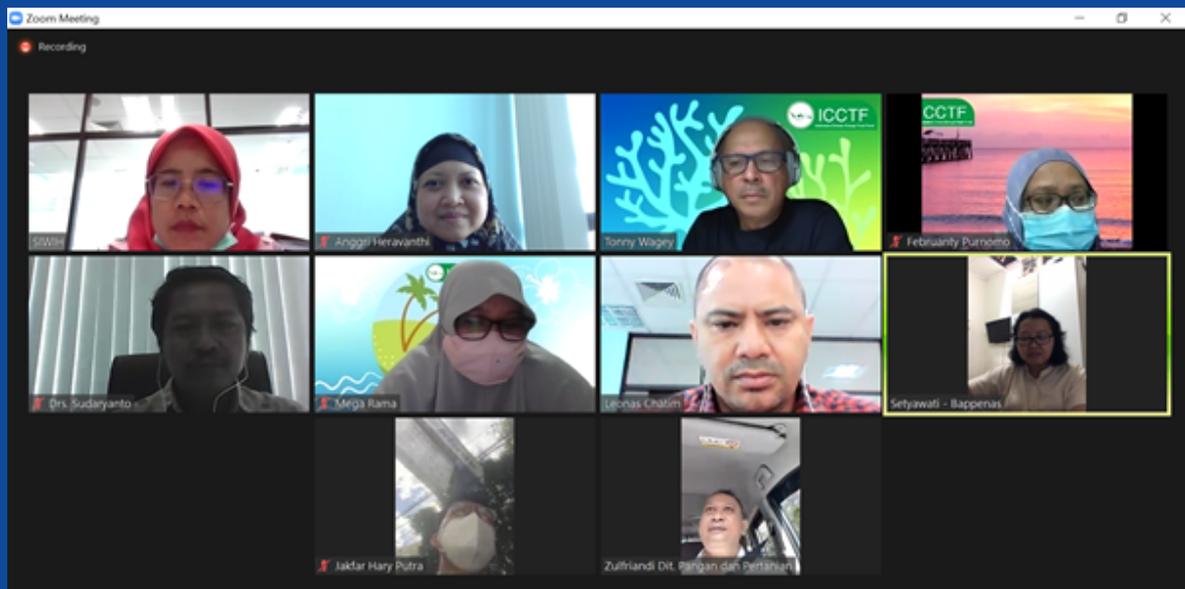
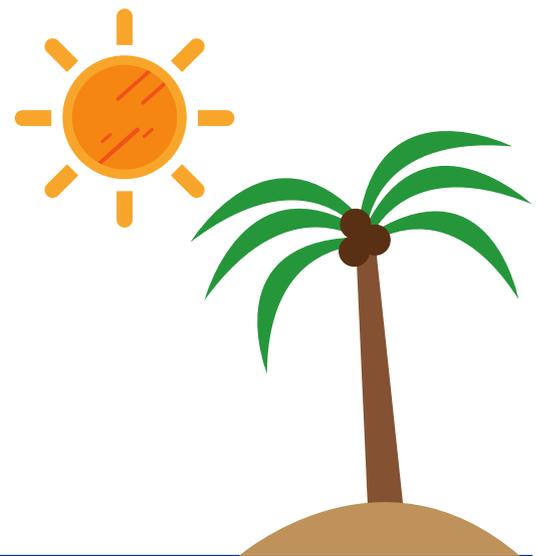
Kegiatan-kegiatan Sekretariat yang dilaksanakan sepanjang kuartal 1 adalah Rapat Koordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen dan perangkat KPA Satker ICCTF pada awal bulan Januari 2021. Rapat dibuka oleh Bapak Tonny selaku Executive Director, kemudian dilanjutkan Sambutan oleh Ibu Setyawati dan perkenalan oleh Bapak Zulfriandi yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen Satker ICCTF mulai Tahun Anggaran 2021, kemudian dilanjutkan dengan perkenalan staf ICCTF. Rapat ini juga membahas perihal:

- i. Penjelasan singkat terkait kegiatan ICCTF di tahun 2020 -2021.
- ii. Anggaran dan Kegiatan ICCTF TA 2021, baik APBN serta Hibah WB dan ADB, dengan total anggaran 68M.
- iii. Kegiatan secara umum Kelautan dan Perikanan secara umum, seperti seperti Blue Carbon, Blue Financing, Bioeconomy, di luar kegiatan yang dilakukan oleh mitra pelaksana.
- iv. Hibah WorldBank sudah ditetapkan 6 mitra pelaksana (NGO dan perguruan tinggi) yang sudah mulai berjalan di tahun 2020.
- v. Sedangkan Hibah ADB lebih bekerja sama dengan ke jasa konsultan seperti perusahaan swasta yang akan menjadi mitra pelaksana.
- vi. Hibah yang dilaksanakan oleh ICCTF ini adalah hibah terencana yang akan selalu terkait dengan Biro dan Inspektorat Bappenas (Biro Renortala, Bagian Keuangan, Bagian Verifikasi, IBAU).
- vii. Jumlah staf ICCTF dan Tim PPK per tanggal 04 Januari 2020 sekitar 25 orang yaitu 19 Staf ICCTF dan 6 orang Tim PPK, di luar konsultan yang dihire oleh donor secara langsung.

- **Diskusi - diskusi untuk persiapan *Annual Report* Tahun Anggaran 2020**

Diskusi ini membahas seputar persiapan dan penyusunan annual Report tahun Anggaran 2020, yang di ikuti oleh perwakilan bagian Program, Komuniasi, PIU ADB, PIU WB dan bagian Operasional. Entry Meeting Pemeriksaan atas Laporan Keuangan COREMAP-CTI dan READSI TA 2020 di Kementerian PPN/Bappenas

Rapat dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2021, melalui Zoom Conference. Agenda rapat adalah Pemaparan Proyek READSI oleh Dit. Pangan dan Pertanian, Bapak Anang Noegroho dan Bapak Zulfriandi dan Pemaparan Proyek COREMAP-CTI Hibah oleh Dit. Kelautan dan Perikanan, Ibu Sriyanti dan Ibu Setyawati.



Gambar 3.1.6 Rapat Koordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen dan perangkat KPA SatkerICCTF pada awal bulan Januari 2021.

- **Rapat Koordinasi penyusunan laporan kuartal 1**

Rapat yang dilaksanakan di hotel Margo Depok tanggal 10 Maret 2021. Agenda rapat adalah Pembahasan seluruh progres kegiatan ICCTF TA untuk Kuartal I 2021 dan Pembahasan finalisasi MoU dengan ADB untuk proposed loan *"Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture"*.



Gambar 3.1.8 Rapat Koordinasi penyusunan laporan kuartal 1 yang dilaksanakan di hotel Margo Depok tanggal 10 Maret 2021



Gambar 3.1.9 Rapat Koordinasi All Staf yang diadakan setiap bulan

- **Rapat koordinasi seluruh staf dilaksanakan setiap bulan.**

Rapat Koordinasi staf dilakukan hampir setiap bulan untuk membahas progress kegiatan yang dilaksanakan oleh tiap bagian dalam ICCTF dan penyelesaian deadline-deadline kegiatan. Selain itu, untuk menunjang dan memperlancar aktifitas kegiatan, ICCTF telah melengkapi fasilitas untuk pegawai dengan pengadaan peralatan kantor berupa pengadaan 4 (empat) buah Notebook, 1 (satu) set Podcast, 3 (tiga) unit printer dan 1 (satu) unit scanner.



SUPPORTING THE INDONESIAN GOVERNMENT FOR A BETTER CLIMATE



www.icctf.or.id

- Indonesia Climate Change Trust Fund
- ICCTFofficial
- ICCTF_ID
- ICCTFofficial

Lippo Kuningan 15th Floor Unit D-E
 Jl. H.R. Rasuna Said Kav.B-12, Jakarta 1
 2940, Indonesia
 Phone: (+62 21) 80679386 (Hunting)
 Fax : (+62 21) 80679387
 Email: secretariat@icctf.or.id

